



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) Tahun 2025

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dalam rangka memujudkan “good governance”. Program – program dimaksud yaitu (1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; (2) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan; (3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; (4) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen; (5) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; (6) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri; (7) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; (8) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi; (9) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (10) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian; (11) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi; (12) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM); (13) Program Pengembangan UMKM; dan (14) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Pontianak, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak

Ibrahim, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda/ Ivc
NIP. 196902111990031005







BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

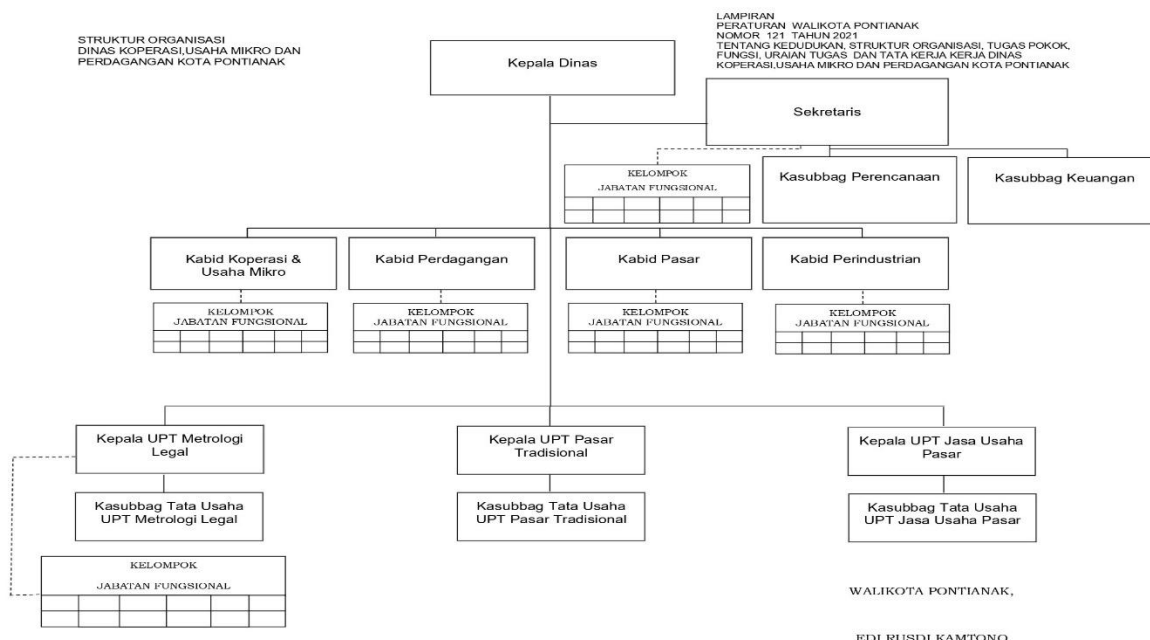
1. Pendahuluan

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satu diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 guna mencapai visi dan melaksanakan misi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi **stakeholders** demi perbaikan kinerja instansi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

2. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi mengacu kepada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021 pasal 6 Bab IV terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, subbag perencanaan, subbag keuangan, bidang Koperasi dan usaha mikro, bidang perdagangan, bidang pasar, bidang perindustrian, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok fungsional. Dengan komposisi sebagai berikut :



3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sesuai Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, Uraian tugas dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;



- e. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan Kota Pontianak; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas** dengan tugas: memimpin dan mengoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.
2. **Sekretaris Dinas**, dengan tugas: merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.
 - 2.1. **Kepala Sub Bagian Perencanaan** dengan tugas: merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Perencanaan.
 - 2.2. **Kepala Sub Bagian Keuangan** dengan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Keuangan.
3. **Bidang Koperasi dan Usaha Mikro** dengan tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha mikro.
4. **Bidang Perdagangan** dengan tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang perdagangan.
5. **Bidang Pasar** dengan tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pasar.
6. **Bidang Perindustrian** dengan tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang industri.
7. **Unit pelaksana teknis:**
 - UPT Metrologi legal**
 - UPT Jasa Usaha Pasar**
 - UPT Pasar Tradisional**



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rutin Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak pada tahun 2025 didukung jumlah aparatur/ pegawai sebanyak 65 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pembina Utama Muda / IVc	1	-	1
2	Pembina Tk. I / IVb	-	1	1
3	Pembina / IVa	3	2	5
4	Penata Tk. I / IIIId	4	11	15
5	Penata / IIIc	4	5	9
6	Penata Tk. I / IIId	3	5	8
7	Penata Muda / IIIa	6	2	8
8	Pengatur Tk. I / IIId	2	2	4
9	Pengatur / IIc	1	0	1
10	Pengatur Muda Tk. I / IIb	-	-	0
11	PPPK / IX	3	5	8
12	PPPK / VII	1	1	2
13	PPPK / V	3	-	3
JUMLAH		31	34	65

Sumber: Sekretariat DKUMP Kota Pontianak

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S2	4	4	8
2	S1	11	24	35
3	D3	5	3	8
4	SMU	11	3	14
JUMLAH		31	34	65

Sumber: Sekretariat DKUMP Kota Pontianak



Tabel 1.3. Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural / Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JABATAN	JUMLAH
1	II B	Kepala Dinas	1
2	III A	Sekretaris	1
3	III B	Kepala Bidang	4
4	IV A	Ka Sub Bag/Kepala UPT	4
5	IV B	Ka Sub Bag TU UPTD	4
JUMLAH			14

Sumber: Sekretariat DKUMP Kota Pontianak

Tabel 1.4. Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal dari Tahun 2015 s/d 2025

No	Tingkat Pendidikan	Tahun										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tamatan S-2	7	7	10	10	9	9	10	9	8	7	8
2	Tamatan S-1	24	24	25	22	25	23	23	23	26	31	35
3	Tamatan D-III	4	4	7	7	6	6	5	5	6	6	8
4	Tamatan SLTA/ sederajat	23	23	31	32	25	21	20	15	12	11	14
5	Tamatan SLTP/ sederajat	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Tamatan SD/ sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		60	60	74	72	65	59	58	52	52	55	65

Sumber: Sekretariat DKUMP Kota Pontianak

Tabel 1.5. Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dari Tahun 2015 s/d 2025

No.	Golongan	Tahun										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gol IV	8	8	10	10	10	8	8	8	8	7	7
2	Gol III	39	39	45	42	42	39	38	36	35	36	40
3	Gol II	13	13	18	19	13	12	12	8	7	6	5
4	Gol I / IX	0	0	1	1	-	-	-	-	2	6	13
Jumlah		60	60	74	72	65	59	58	52	52	55	65

Sumber: Sekretariat DKUMP Kota Pontianak



Tabel 1.6. Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja

GOLONGAN JENIS KELAMIN BIDANG	IV/c		IV/b		IV/a		III/d		III/c		III/b		III/a		II/d		P3K		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Sekretariat	1	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	9
Industri	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
Koperasi & UM	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	7
Perdagangan	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	1	1	2	11
Pasar	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	9
UPT Pasar Tradisional	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	10
UPT Jasa Usaha Pasar	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4
UPT Metrologi	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	-	1	1	-	1	-	10
JUMLAH	1	-	-	1	4	2	4	13	3	3	5	3	6	3	3	3	5	6	65

Sumber: Sekretariat DKUMP Kota Pontianak

Dibandingkan dengan masing-masing urusan yang ditangani Jumlah pegawai dari segi penempatan kerja kurang memadai.

Tabel 1.7. Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2014 s/d 2025

No.	Tahun	Jumlah Pegawai
1	2014	58
2	2015	60
3	2016	60
4	2017	74
5	2018	72
6	2019	65
7	2020	59
8	2021	58
9	2022	52
10	2023	52
11	2024	55
12	2025	65

Sumber: Sekretariat DKUMP Kota Pontianak

Perkembangan jumlah pegawai dari tahun 2014 s/d 2025 tidak mengalami penambahan yang signifikan dibandingkan dengan peningkatan urusan yang ditangani.



5. Sumber Daya Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan tahun 2025 berasal dari APBD Kota Pontianak dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.8.
Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Setelah Perubahan)	REALISASI	% REAL
1	PENDAPATAN	6.800.000.000	6.348.181.000	93,36
	Retribusi pelayanan pasar	3.506.900.000	4.907.809.000	139,95
	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.193.100.000	1.211.326.000	37,94
	Hasil Sewa BMD	100.000.000	229.046.000	229,05
	Jumlah Pendapatan	6.800.000.000	6.348.181.000	93,36
2	BELANJA	21.958.027.821	20.448.647.967	93,13
	Belanja Operasi	20.716.419.421	19.342.655.678	93,37
	- Belanja Pegawai	9.594.774.600	8.892.044.533	92,68
	- Belanja Barang dan Jasa	10.222.757.762	9.551.726.145	93,44
	- Belanja Subsidi	898.887.059	898.885.000	100,00
	- Belanja Hibah			
	Belanja Modal	1.241.608.400	1.105.992.289	89,08
	- Belanja Tanah			
	- Belanja Peralatan dan Mesin	874.064.400	743.244.289	85,03
	- Belanja Gedung dan Bangunan	260.000.000	258.871.000	99,57
	- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.544.000	53.877.000	93,63
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	50.000.000	50.000.000	100,00
	- Belanja Aset Lainnya			
	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja	21.958.027.821	20.448.647.967	93,13
	Surplus / (Deflalt)	-15.158.027.821	-14.100.466.967	93,02

Sumber: Sekretariat DKUMP Kota Pontianak



6. Sarana dan Prasarana

Perkembangan Sarana Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Gedung Kantor

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak saat ini memiliki sarana gedung kantor sebanyak 1 unit. Kegiatan tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada kantor yang terletak di Jalan Aliyang No. 7C Pontianak (Kantor Pusat III Pemkot Pontianak) yaitu diperuntukkan Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Koperasi & Usaha Mikro, UPTD Pasar Tradisional, UPTD Jasa Usaha Pasar. Mulai Juni 2018 UPT Metrologi Legal menempati Gedung Pengalihan eks Unit Pelayanan Kemetrolgian Kota Pontianak di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 dan Instalasi Tangki Umur Mobil yang bertempat di Jl. Khatulistiwa serta Gedung UMKM mulai beroperasi Tahun 2020 difungsikan untuk mempromosikan produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah Kota Pontianak.

2. Kendaraan

Kendaraan dinas operasional yang tersedia, yaitu :

- 1) Kendaraan Roda Dua = 3 unit
- 2) Kendaraan Roda Empat = 3 unit
- 3) Kendaraan Roda Tiga = 1 Unit

3. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor lainnya

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2025 dapat dilihat pada pada tabel Kartu Inventaris Barang (KIB) dan diakses melalui website Pemerintah Kota Pontianak sistem e-aplikasi SIMBADA.



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIS ISSUED)

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melaksanakan urusan wajib Koperasi dan Usaha Mikro, urusan pilihan Perindustrian dan perdagangan mempunyai peran yang strategis sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Pontianak tahun 2024 – 2026 adalah mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing. Dengan sasaran strategis yang terkait langsung dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak antara lain laju PDRB sektor perdagangan, laju PDRB sektor industri serta tingkat inflasi. Permasalahan strategis yang dihadapi untuk mencapai sasaran strategis, meliputi:

1. Kegiatan Perlindungan Konsumen Kota Pontianak masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah belum operasionalnya lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), masih rendahnya sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.
2. Dengan penyerahan Metrologi legal kepada Pemerintah Kota Pontianak sehingga pelayanan tertib UTTP perlu peralatan, SDM yang kompeten, anggaran operasional yang memadai, sehingga investasi ke peralatan, peningkatan SDM, dan biaya akreditasi dalam jangka menengah diperlukan untuk mempersiapkan laboratorium yang terakreditasi dan bersaing dengan laboratorium sejenis.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak, Tahun 2025 menuju Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa berwawasan Lingkungan, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/EAC) 2015, dan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010 merupakan tantangan bagi OPD yang menangani sektor Perdagangan, Industri dan Koperasi dan Usaha Mikro untuk merevitalisasi industri berstruktur kuat, peningkatan daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro dan penguatan serta pengamanan perdagangan.
4. Tingkat kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar, manajemen pengelolaan pasar belum profesional, pengunjung pasar yang



cenderung di lantai bawah merupakan tantangan tersendiri untuk memanfaatkan pasar yang ada.

5. Belum optimalnya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan Usaha mikro.
6. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Industri, Perdagangan, Pasar juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan antar kawasan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak merupakan instansi teknis yang bertugas membantu Walikota melaksanakan visi dan misinya dalam kurun waktu 2024 - 2026 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi sebelum Renstra 2025 – 2029 disahkan.

Titik berat pembangunan bidang ekonomi urusan wajib Koperasi dan UKM dan urusan pilihan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Pontianak tahun 2024 – 2026 adalah mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing. Dengan sasaran strategis yang terkait langsung dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak antara lain Meningkatnya Laju PDRB Sektor Perdagangan, meningkatnya laju PDRB sektor industri, terkendalinya tingkat inflasi.

Adapun tujuan strategis yang telah ditetapkan adalah **Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri**. Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menyusun indikator prioritas sebagai berikut:

1. Laju PDRB sektor perdagangan

2. Laju PDRB sektor industri

3. Tingkat inflasi

Tujuan strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak akan dicapai melalui 14 (empat belas) program yang akan dilaksanakan masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun 14 (empat belas) program prioritas dimaksud yaitu:

PROGRAM PRIORITAS

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri



6. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
8. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
9. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
10. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
11. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
12. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
13. Program Pengembangan UMKM
14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. PERJANJIAN DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja merupakan suatu dokumen kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025, serta kelengkapan dokumen perencanaan lainnya dijabarkan Rincian Jenis Pengeluaran Per Kegiatan, Tolok Ukur dan Uraian Pengeluaran, Lembaran Kerja, Petunjuk Operasional, Rencana Pengeluaran Keuangan Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, serta Petunjuk Khusus lainnya. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan tujuan strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sasaran **Meningkatnya Pemanfaatan sarana distribusi perdagangan binaan** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan.

Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan serta 4 (empat) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari kegiatan:
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sub kegiatan:



- ❖ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output berupa Jumlah sarana distribusi perdagangan target 3 unit. Alokasi anggaran sebesar Rp. 134.179.435,-.
 - ❖ Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output berupa Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan target 15 unit. Alokasi anggaran sebesar Rp. 145.030.000,-.
 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan target 1 dokumen. Alokasi anggaran Rp. 31.500.000,-.
 - ❖ Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada Pengelola sarana distribusi perdagangan target 1 dokumen. Alokasi anggaran sebesar Rp. 31.500,000,-.
2. Sasaran **Terkendalinya ketersediaan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:
- Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya,** Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) Program dan 5 (lima) kegiatan serta 7 (tujuh) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut:
- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, terdiri dari kegiatan:
- Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat dengan sub kegiatan:
 - ❖ Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C dengan indikator output Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman



Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik target 1 Dokumen. Alokasi anggaran sebesar Rp. 33.407.880,-.

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, terdiri dari kegiatan:

- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan indikator output Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat target 12 Laporan. Alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000,-.
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan indikator output jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan target 12 Laporan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-.
 - ❖ Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/kota dengan indikator output Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota target 4 Laporan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-.

c. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari kegiatan:

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan indikator output Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang target 18000 unit. Alokasi anggaran sebesar Rp. 282.295.800,-.



d. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, terdiri dari kegiatan:

- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah UMKM yang Memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota target 30 UMKM. Alokasi anggaran sebesar Rp. 270.000.000,-.
 - ❖ Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah UMKM yang Memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelah dan jasa akomodasi target 75 UMKM. Alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-.

3. Sasaran **Meningkatnya Pelaku Industri Kecil** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 2 (dua) kegiatan serta 6 (enam) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, terdiri dari kegiatan:
- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan indikator output jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayah industri target 1 Dokumen. Alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,-.
 - ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri target 1 Dokumen. Alokasi anggaran Rp. 576.002.000,-.



- ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan indikator output jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri target 1 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.000.000,-.
 - ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan indikator output jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat target 1 dokumen dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 163.998.000,-.
 - ❖ Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat Diawasi - Jumlah Program Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat Diimplementasikan target 100 Dokumen dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan:
- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota target 1 dokumen. Alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-.



4. Sasaran **Meningkatnya Koperasi Yang Aktif** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase koperasi aktif, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) Program dan 4 (empat) kegiatan serta 4 (empat) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut :

- a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, terdiri dari kegiatan:
 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dan target 512 Unit Usaha. Alokasi anggaran Rp. 21.500.000,-.
- b. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi, terdiri dari kegiatan:
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USK Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan dan target 130 Unit Usaha. Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-.
- c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, terdiri dari kegiatan:
 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan indikator output Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian dan target 400 orang. Alokasi anggaran sebesar Rp. 878.058.000,-.
- d. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, terdiri dari kegiatan:
 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,



Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha dengan indikator output Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha dan target 120 unit usaha. Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000,-.

5. Sasaran **Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 2 (dua) kegiatan serta 2 (dua) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), terdiri dari kegiatan:
 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan indikator output Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro dan target 100 unit usaha. Alokasi anggaran sebesar Rp. 13.000.000,-.
- b. Program Pengembangan UMKM, terdiri dari kegiatan:
 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pengembangan Usaha Mikro dengan indikator output Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dan target 280 unit usaha. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.936.878.565,-.



C. PERJANJIAN DAN RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Rencana Kinerja merupakan suatu dokumen kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025, perubahannya, serta kelengkapan dokumen perencanaan lainnya dijabarkan Rincian Jenis Pengeluaran Per Kegiatan, Tolok Ukur dan Uraian Pengeluaran, Lembaran Kerja, Petunjuk Operasional, Rencana Pengeluaran Keuangan Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, serta Petunjuk Khusus lainnya. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan tujuan strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sasaran **Meningkatnya Pemanfaatan sarana distribusi perdagangan binaan** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan.

Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan serta 4 (empat) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari kegiatan:
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sub kegiatan:
 - ❖ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output berupa Jumlah sarana distribusi perdagangan target 3 unit. Alokasi anggaran sebesar Rp. 128.227.048,-.
 - ❖ Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output berupa Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan target 15 unit. Alokasi anggaran sebesar Rp. 105.019.000,-.
 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan sub kegiatan:



- ❖ Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan target 1 dokumen. Alokasi anggaran Rp. 27.545.000,-.
- ❖ Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada Pengelola sarana distribusi perdagangan target 1 dokumen. Aloaksi anggaran sebesar Rp. 28.250,000,-.

2. Sasaran **Terkendalinya ketersediaan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya, Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) Program dan 5 (lima) kegiatan serta 7 (tujuh) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, terdiri dari kegiatan:
 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat dengan sub kegiatan:
 - ❖ Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C dengan indikator output Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik target 1 Dokumen. Alokasi anggaran sebesar Rp. 54.734.304,-.
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, terdiri dari kegiatan:
 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan indikator output



- Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat target 12 Laporan. Alokasi anggaran sebesar Rp.4.058.000,-.
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan indikator output jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan target 12 Laporan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 94.328.000,-.
 - ❖ Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/kota dengan indikator output Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota target 4 Laporan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.416.474.979,-.
 - c. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari kegiatan:
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan indikator output Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang target 18000 unit. Alokasi anggaran sebesar Rp. 239.749.800,-.
 - d. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, terdiri dari kegiatan:
 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah UMKM yang Memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota target 30 UMKM. Alokasi anggaran sebesar Rp. 156.975.500,-.
 - ❖ Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah UMKM yang



Memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelah dan jasa akomodasi target 75 UMKM. Alokasi anggaran sebesar Rp. 491.603.200,-.

3. Sasaran **Meningkatnya Pelaku Industri Kecil** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 2 (dua) kegiatan serta 6 (enam) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, terdiri dari kegiatan:
- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan indikator output jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayah industri target 1 Dokumen. Alokasi anggaran sebesar Rp. 63.938.000,-.
 - ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri target 1 Dokumen. Alokasi anggaran Rp. 849.002.868,-.
 - ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan indikator output jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri target 1 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.119.340.245,-.
 - ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan indikator output jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat target 1 dokumen dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 332.239.920,-.



- ❖ Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat Diawasi - Jumlah Program Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat Diimplementasikan target 100 Dokumen dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 576.640.000,-.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan:
 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota target 1 dokumen. Alokasi anggaran sebesar Rp. 37.627.000,-.
- 4. Sasaran **Meningkatnya Koperasi Yang Aktif** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase koperasi aktif, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) Program dan 4 (empat) kegiatan serta 4 (empat) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut:

 - a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, terdiri dari kegiatan:
 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dan target 512 Unit Usaha. Alokasi anggaran Rp. 11.440.000,-.



- b. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, terdiri dari kegiatan:
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan dan target 130 Unit Usaha. Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.435.680,-.
 - c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, terdiri dari kegiatan:
 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan indikator output Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian dan target 400 orang. Alokasi anggaran sebesar Rp. 866.966.800,-.
 - d. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, terdiri dari kegiatan:
 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha dengan indikator output Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha dan target 120 unit usaha. Alokasi anggaran sebesar Rp. 96.900.180,-.
5. Sasaran **Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:
- Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru**, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan serta 2 (dua) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut:
- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), terdiri dari kegiatan:



- Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan indikator output Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro dan target 100 unit usaha. Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.650.000,-.
- b. Program Pengembangan UMKM, terdiri dari kegiatan:
 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pengembangan Usaha Mikro dengan indikator output Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dan target 280 unit usaha. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.918.602.650,-.

TABEL II.1
KETERKAITAN MISI, TUJUAN, SASARAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025

MISI / TUJUAN	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
SASARAN STRATEGIS 1	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan
SASARAN STRATEGIS 2	Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase Tingkat Kecukupan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya
SASARAN STRATEGIS 3	Meningkatnya Pelaku Industri Kecil
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil
SASARAN STRATEGIS 4	Meningkatnya Koperasi yang Aktif
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase Koperasi Aktif
SASARAN STRATEGIS 5	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja berdasarkan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 dengan realisasinya.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 mencakup 5 (lima) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target *outcome* yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja sasaran serta capaian kinerja sasaran Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir.
3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan realisasi kinerja sasaran dan target Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan realisasi kinerja sasaran Tahun 2025 dengan Standar Nasional.
5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.



Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing - masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing - masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata - Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran dengan "**Metode Rata- Rata Data Kelompok**" adalah penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata - rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator untuk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kegiatan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$



Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut :

Nilai Mean (x)	Kategori
92,5	= Sangat Berhasil
77,5	= Berhasil
62,5	= Cukup Berhasil
27,5	= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil.**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja tujuan strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sebagai berikut :

TUJUAN PERANGKAT DAERAH

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	%
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	Laju PDRB sektor Perdagangan	4.99%	4.72%	94.59
		Laju PDRB sektor industri	4.77%	0.69%	14.47
		Tingkat inflasi	3 ± 1 %	1.5%	100

Sumber data statistik yang diolah

Kinerja tujuan Laju PDRB sektor Perdagangan dengan target 4.99% pada tahun 2025 realisasi 4.72% atau 94.59%.

laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kota Pontianak tahun 2025 merupakan cerminan dari kondisi pertumbuhan ekonomi yang stabil namun melambat di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi kota.

faktor-faktor yang menyebabkan laju pertumbuhan sektor perdagangan Kota Pontianak tertahan di angka tersebut:



- **Pelemahan Daya Beli Lokal:** Sektor perdagangan di Kota Pontianak sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga penduduk lokal. Pada tahun 2025, terjadi tekanan pada daya beli masyarakat kelas menengah yang menyebabkan volume transaksi di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional tidak tumbuh sepesat tahun sebelumnya.
- **Inflasi Transportasi dan Distribusi:** Sebagai kota perdagangan dan jasa, biaya logistik sangat mempengaruhi harga barang. Fluktuasi biaya transportasi menuju Kalimantan Barat berdampak pada margin keuntungan dan harga jual di tingkat pedagang eceran, yang secara tidak langsung menghambat laju pertumbuhan nilai tambah sektor ini.
- **Kinerja Sektor Pendukung (Sektor Basis):** Berdasarkan *analisis location quotient* (LQ), sektor perdagangan merupakan salah satu sektor basis di Pontianak. Namun, ketika sektor pendukung lain seperti konstruksi atau industri pengolahan mengalami perlambatan investasi di awal tahun, *multiplier effect* terhadap sektor perdagangan pun ikut tertahan.
- **Pergeseran Pola Konsumsi (Digitalisasi):** Peningkatan transaksi melalui platform digital luar daerah seringkali tidak tercatat sepenuhnya dalam PDRB perdagangan lokal (yang berbasis pada outlet fisik di kota), sehingga pertumbuhan real di lapangan mungkin terasa lebih tinggi namun tidak sepenuhnya terpotret dalam angka statistik PDRB konvensional.
- **Realisasi Belanja Pemerintah:** Sebagaimana dicatat oleh Pemerintah Kota Pontianak, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal di beberapa sektor juga dipengaruhi oleh kecepatan realisasi belanja modal pemerintah yang baru terakselerasi di paruh kedua tahun.

Kinerja tujuan laju PDRB sektor industri dengan target 4,77% pada tahun 2025 realisasi hanya 0.69% atau 14.47%. kinerja sektor industri di Kota Pontianak sepanjang tahun 2025 menunjukkan nilai penurunan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2024 laju PDRB sektor Industri sebesar 2,29%. Penurunan PDRB sektor industri memang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya produktivitas dan daya saing usaha industri. Selain itu Kota Pontianak sebagai Kota Perdagangan dan Jasa sangat didominasi dengan pertumbuhan jasa dan perdagangan sedangkan sektor industri hanya sebagai



penunjang. Pertumbuhan sektor usaha industri akan berkembang jika didukung dengan iklim usaha dan investasi yang efisien, selain itu harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan permintaan pasar, serta memperluas pangsa pasar, baik di dalam negeri maupun secara ekspansif ke luar negeri.

Realisasi PDRB industri tahun 2025 sebesar 0,69 % atau 14,47%, masih dibawah target yaitu 4,77%, hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu;

1. Masih kurangnya kesadaran SDM pelaku industri kecil dan industri rumah tangga untuk legalitas perizinan melalui platform oss.go.id
2. Tumbuh kembang platform digital sehingga membuat banyak reseller menghentikan kerja sama dengan IKM lokal, yang mengancam keberlangsungan produksi
3. Penetapan Kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan mendukung dalam tumbuh kembang pelaku UMKM terutama sektor jasa dan perdagangan akan tetapi kota Pontianak bukanlah kota industri/perindustrian sehingga aturan mengenai kawasan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri tidak dapat dilaksanakan karena mewajibkan peruntukkan kawasan industri minimal 50 hektar sedangkan Kota Pontianak tidak memiliki lagi wilayah minimal seluas 50 hektar yang dapat diperuntukkan kawasan industri sehingga ini menjadi salah satu kendala dalam tumbuh kembang industri terutama menengah tinggi.

Kinerja tujuan Tingkat inflasi dengan target kisaran $3 \pm 1\%$ pada tahun 2025 realisasi 1,5%, capaiannya masuk kategori sangat berhasil, menunjukkan bahwa Kota Pontianak sangat berhasil dalam menekan tingkat inflasi.

Kinerja inflasi Kota Pontianak sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang **terkendali** dan sering kali menjadi yang terendah di tingkat regional maupun nasional.



Secara keseluruhan, Kota Pontianak berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah dengan manajemen inflasi terbaik di Indonesia sepanjang tahun 2025.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	Laju PDRB sektor Perdagangan	4.99%	6.8%	6.81%	4.72%
		Laju PDRB sektor industri	4.77%	0.05%	2.29%	0.69%
		Tingkat inflasi	3 ± 1%	2.09%	1.58%	1.5%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Laju PDRB sektor perdagangan pada tahun 2025 sebesar 4,72% mengalami penurunan dari tahun 2024 yaitu 6,81% dan hal ini menunjukkan Kota Pontianak mengalami penurunan laju PDRB sektor perdagangan. PDRB sektor perdagangan sangat dipengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), inflasi, Dana Alokasi Umum (DAU), penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, dan belanja sektor publik. Laju PDRB sektor industri pada tahun 2025 sebesar 0,69% mengalami penurunan dari tahun 2024 yaitu 2,29%.

Tingkat Inflasi pada tahun 2025 sebesar 1,5% bisa dikatakan sama dari tahun 2024 yaitu 1,58 dan hal ini menunjukkan Kota Pontianak berhasil meningkatkan tingkat inflasi.

3. Membandingkan relisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	Laju PDRB sektor Perdagangan	4.99%	4.72%	18.5%	25.5
		Laju PDRB sektor industri	4.77%	0.69%	14.55%	4.74
		Tingkat inflasi	3 ± 1%	1.5%	2,5 ± 1%	100

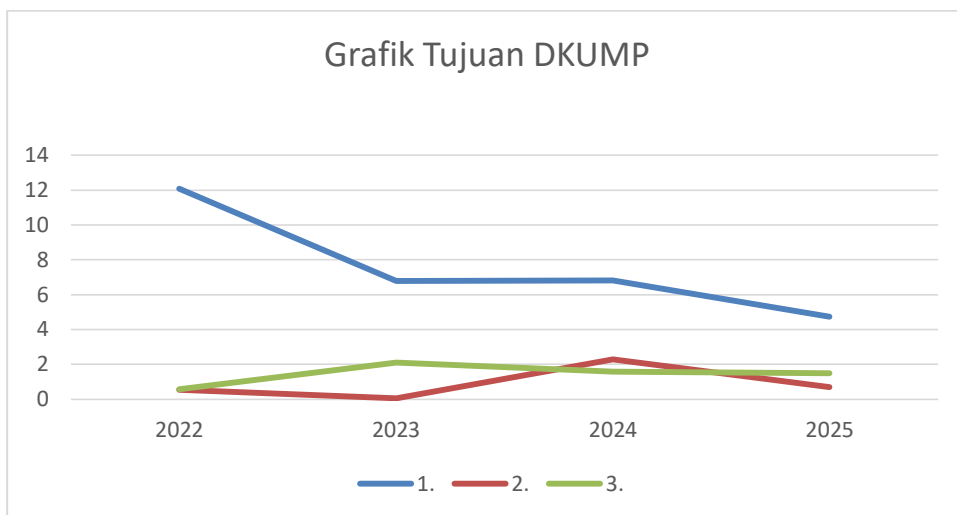
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Laju PDRB sektor perdagangan dan Laju PDRB sektor industri dibandingkan dengan target Renstra menunjukkan penurunan pada tahun 2025 capaiannya dan masuk kategori kurang berhasil. Hal ini disebabkan dalam penetapan target di Renstra sangat optimis dengan tidak melihat kondisi beberapa tahun terakhir yang cenderung semakin menurun disebabkan kondisi global dan nasional, jadi diharapkan dapat dilakukan revisi target dalam Rencana Strategis Kota Pontianak dan Organisasi. Sedangkan tingkat inflasi dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 bisa dikatakan Stabil.

Realisasi Tujuan DKUMP

No	Indikator Tujuan	2022	2023	2024	2025
1.	Laju PDRB sektor Perdagangan	12,09	6,80	6,81	4,72
2.	Laju PDRB sektor industri	0,53	0,05	2,29	0,69
3.	Inflasi	0,57	2,09	1,58	1,5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2025

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi Laju PDRB sektor perdagangan dari tahun 2022 meningkat pada angka 12,09%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 6,80 % dan akhirnya pada tahun 2025 mengalami penurunan lagi ke 4,71%.

Demikian juga pada laju PDRB sektor industri mengalami fluktuasi nilai pada setiap tahunnya. Nilai tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar 2,29%, namun di tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dibawah 1 yaitu 0,51% dan 0,05%, demikian juga pada tahun 2025 mencapai 0,69%.

Inflasi terlihat relatif stabil dari tahun ke tahun, Pada tahun 2022 berada pada angka 0,57, pada tahun 2023 diangka 2,09, dan pada tahun 2024 mencapai 1,58 dan tahun 2025 mencapai 1,5. Angka ini menunjukkan kondisi yang relatif stabil dalam pengendalian inflasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2025	Target Nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	Laju PDRB sektor Perdagangan	4.72%	-
		Laju PDRB sektor industri	0.69%	-
		Tingkat inflasi	1.5%	2,5 ± 1



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Laju PDRB sektor perdagangan dan Laju PDRB sektor industri Tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan Standar Nasional karena tidak ada nilai target nasional. Sedangkan Tingkat Inflasi pada tahun 2025 dibandingkan dengan standar nasional dikatakan stabil hal ini menunjukkan Kota Pontianak berhasil meningkatkan tingkat inflasi.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Penyebab Keberhasilan/Keagalan	Alternatif Solusi yang dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan industri	Laju PDRB sektor Perdagangan	Keberhasilan	1. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha perdagangan dan UMKM. 2. Mengembangkan sistem pemasaran dan promosi produk daerah. 3. Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas perdagangan. 4. Memperkuat jaringan distribusi barang melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha dan distributor serta antar pemerintah daerah.	1. Mengoptimalkan program pengembangan perdagangan daerah. 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk daerah. 3. Mendorong penguatan kapasitas pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing produk. 4. Memperluas kerja sama perdagangan antar daerah guna meningkatkan aktivitas



					perdagangan.
		Laju PDRB sektor industri	Kegagalan	1. Meningkatkan dukungan Pemerintah Kota Pontianak yang memberikan ruang gerak yang besar untuk pelaku industri kecil 2. Meningkatkan peran asosiasi para pelaku industri kreatif dari berbagai sektor industri kecil 3. Meningkatkan Daya kreatifitas yang tak terbatas khususnya untuk sektor industri kecil 4. Perlu adanya Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak yang lebih konkrit 5. Meningkatkan promosi dan kualitas produk pelaku industri"	1. Terus meningkatkan sarana/prasarana dan kebijakan yang memberikan ruang gerak bagi pelaku industri kecil 2. Menjalin kerjasama dengan asosiasi yang ada untuk pengembangan industri kecil 3. Terus meningkatkan daya kreatifitas terutama pada sektor industri kecil 4. Mendorong pertumbuhan industri berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Promosi tingkat lokal, nasional maupun internasional"
		Tingkat inflasi	Keberhasilan	1. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok secara rutin.	1. Memperkuat sistem pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.



				2. Memperkuat koordinasi dengan distributor, agen, dan pelaku usaha. 3. Melaksanakan kegiatan stabilisasi harga seperti operasi pasar/pasar murah. 4. Mengoptimalkan peran TPID dalam pengendalian inflasi daerah.	2. Mengoptimalkan sinkronisasi data dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan. 3. Meningkatkan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan komoditas strategis. 4. Memperkuat sistem distribusi dan logistik guna menjaga stabilitas harga di pasar.
--	--	--	--	---	---

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

Laju PDRB sektor Perdagangan

a. Alternatif solusi yang dilakukan

- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha perdagangan dan UMKM.
- Mengembangkan sistem pemasaran dan promosi produk daerah.
- Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas perdagangan.
- Memperkuat jaringan distribusi barang melalui kerja sama dengan pelaku usaha dan distributor serta antar pemerintah daerah.

b. Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut

- Mengoptimalkan program pengembangan perdagangan daerah.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk daerah.
- Mendorong penguatan kapasitas pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing produk.



- Memperluas kerja sama perdagangan antar daerah guna meningkatkan aktivitas perdagangan.

Laju PDRB sektor Industri

a. Alternatif Solusi yang dilakukan

- Meningkatkan dukungan Pemerintah Kota Pontianak yang memberikan ruang gerak yang besar untuk pelaku industri kecil
- Meningkatkan peran asosiasi para pelaku industri kreatif dari berbagai sektor industri kecil
- Meningkatkan Daya kreatifitas yang tak terbatas khususnya untuk sektor industri kecil
- Perlu adanya review Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak
- Meningkatkan promosi dan kualitas produk pelaku industri

b. Rekomendasi/Rencana Tindak lanjut

- Terus meningkatkan sarana/prasarana dan kebijakan yang memberikan ruang gerak bagi pelaku industri kecil
- Menjalin kerjasama dengan asosiasi yang ada untuk pengembangan industri kecil
- Terus meningkatkan daya kreatifitas terutama pada sektor industri kecil
- Mendorong pertumbuhan industri berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak
- Promosi tingkat lokal, nasional maupun internasional"

Tingkat Inflasi

a. Alternatif solusi yang dilakukan

- Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok secara rutin.
- Memperkuat koordinasi dengan distributor, agen, dan pelaku usaha.
- Melaksanakan kegiatan stabilisasi harga seperti operasi pasar/pasar murah.
- Mengoptimalkan peran TPID dalam pengendalian inflasi daerah.



b. Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut

- Memperkuat sistem pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
- Mengoptimalkan sinkronisasi data dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- Meningkatkan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan komoditas strategis.
- Memperkuat sistem distribusi dan logistik guna menjaga stabilitas harga di pasar.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sebagai berikut :

SASARAN PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS KE-1 : “Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan”

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	%
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan	80%	82%	103%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Indikator Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan Tahun 2025 realisasinya sebesar 82,12% (5640 kapasitas terisi/ 6868 kapasitas tersedia) atau tercapai 103% dari target yang ditetapkan.



$\frac{\Sigma \text{ sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan}}{\Sigma \text{ sarana distribusi perdagangan yang tersedia}}$	X 100%
---	--------

Nilai realisasi ini menunjukkan lebih baik dari target sebesar 80,00%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **103 %**.

Didukung dengan :

a. Analisis atas efisiensi sumber daya

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	289.041.048	277.748.547	96.09	100%	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional Program dan kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan program dan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp. 277.748.547,- atau 96.09% dari pagu Rp. 289.041.048,-.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan,	100%	100%	100	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan



	indikator : Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatan				target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
1.1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, indikator : Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	15 unit	15 Unit	100	Realisasi indikator Kegiatan 15 pasar sama dengan target 15 pasar sama dengan target (100 persen). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, indikator : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit	3 unit	100	Realisasi indikator Sub Kegiatan (3 pasar) lebih besar dari target (3 pasar) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
1.1.2	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, indikator : Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15 unit	15 unit	100	Realisasi indikator Sub Kegiatan (15 pasar) lebih besar dari target (15 pasar). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
1.2	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, indikator : Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	15 unit	15 unit	100	Realisasi indikator Kegiatan 15 pasar sama dengan target 15 pasar sama dengan target (100 Persen). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
1.2.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	1 dokumen	100	Realisasi indikator Sub Kegiatan (1 dokumen) sama dengan target (1 dokumen). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
1.2.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada	1 dokumen	1 dokumen	100	Realisasi indikator Sub Kegiatan (1 dokumen) sama dengan target (1 dokumen). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja



	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
--	---	--	--	--	--

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Pada Tahun Anggaran 2025, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang meliputi kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, penyediaan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, serta pembinaan dan pengendalian terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari capaian realisasi program dan kegiatan yang mencapai 100 persen dari target yang telah ditentukan, baik dari sisi jumlah unit sarana distribusi perdagangan maupun dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan pengelola.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan	80%	82.40%	82.53%	82.12%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan beberapa tahun terakhir, dapat diketahui bahwa indikator Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan menunjukkan kinerja yang relatif stabil dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2023, realisasi capaian indikator tersebut tercatat sebesar 82,40 persen, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi 82,53 persen. Sementara itu, pada Tahun 2025 realisasi capaian indikator



mencapai 82,12 persen. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja Tahun 2025 masih berada di atas target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 80 persen.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana distribusi perdagangan binaan tetap terjaga dengan baik dan mencerminkan keberlanjutan hasil pembinaan serta pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Fluktuasi capaian yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sarana, tingkat aktivitas perdagangan, serta dinamika pelaku usaha dalam memanfaatkan sarana distribusi yang tersedia.

Dengan capaian yang melampaui target, dapat disimpulkan bahwa kinerja pada Tahun 2025 telah memenuhi indikator sasaran yang ditetapkan, sekaligus menjadi dasar untuk peningkatan kualitas pemanfaatan sarana distribusi perdagangan pada tahun-tahun berikutnya.

DATA KAPASITAS PASAR																								
NO	NAMA PASAR	ALAMAT PASAR	KECAMATAN	JUMLAH KAPASITAS RUANGAN							JUMLAH RUANG TERISI							JUMLAH RUANG KOSONG						
				LOS	KIOS LTD	KIOS LT.1	TOKO 1 LT	TOKO 2 LT	TOKO 3 LT	KAPA SITAS	LOS	KIOS LTD	KIOS LT.1	TOKO 1 LT	TOKO 2 LT	TOKO 3 LT	KAPA SITAS	LOS	KIOS LTD	KIOS LT.1	TOKO 1 LT	TOKO 2 LT	TOKO 3 LT	KAPA SITAS
1	PASAR DAHLIA	Jl. HRA Rahman, Kel Sungai Jawi Dalam	PTK BARAT	366	200	321	-	-	-	887	342	199	286	-	-	-	827	24	1	35	-	-	-	60
2	PASAR CEMPAKA	Jl. Kapten Marsam, Kel Darat Sekip	PTK KOTA	48	47	181	-	-	-	276	48	47	180	-	-	-	275	-	-	1	-	-	-	1
3	PASAR PURING	Jl. Khatulistiwa, Kel Siantan Tengah	PTK UTARA	387	89	-	-	32	-	508	387	89	-	-	32	-	508	-	-	-	-	-	-	-
4	PASAR TERATAI	Jl. Komoyo Sudarso, Kel Sungai Jawi Luar	PTK BARAT	198	120	87	-	-	-	405	198	120	2	-	-	-	320	-	-	85	-	-	-	85
5	PASAR KEMUNING	Jl. Prof M. Yamin, Kel Sungai Bangkong	PTK KOTA	159	-	33	-	-	-	192	159	-	6	-	-	-	165	-	-	27	-	-	-	27
6	PASAR FLAMBOYAN	Jl. Gajahmada, Kel Benua Melayu Darat	PTK SELATAN	1.567	203	-	-	-	-	1.770	1.565	201	-	-	-	-	1.766	2	2	-	-	-	-	4
7	PASAR BELIMBING	Jl. Komoyo Sudarso, Kel Sungai Jawi Luar	PTK BARAT	72	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	72
8	PASAR KENANGA KERATON	Jl. Tritura (Ko Keraton), Kel Tambelan Sampit	PTK TIMUR	192	18	-	-	-	-	210	192	18	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-
9	PASAR KENANGA-ANGGREK	Jl. Ya' M. Sabran, Kel Tanjung Hulu	PTK TIMUR	100	70	-	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	100	70	-	-	-	-	170
10	PASAR TENGAH :																							
1	BLOK SERAYU	Jl. Serayu, Darat Sekip	PTK KOTA	64	-	-	-	-	-	64	10	-	-	-	-	-	10	54	-	-	-	-	-	54
2	BLOK CIUJUNG	Jl. Asahan, Darat Sekip	PTK KOTA	-	73	51	-	-	-	124	-	61	14	-	-	-	75	-	12	37	-	-	-	49
3	BLOK CISADANE	Jl. Asahan, Darat Sekip	PTK KOTA	-	76	54	-	-	-	130	-	75	17	-	-	-	92	-	1	37	-	-	-	38
4	BLOK PAWAN	Jl. Mahakam, Benua Melayu Laut	PTK SELATAN	6	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
5	BLOK BATANGHARI BARAT	Jl. Batanghari, Darat Sekip	PTK KOTA	-	33	-	-	-	-	33	-	32	-	-	-	-	32	-	1	-	-	-	-	1
6	BLOK BATANGHARI TIMUR	Jl. Batanghari, Darat Sekip	PTK KOTA	-	39	-	-	-	-	39	-	39	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-
7	BLOK DUNIA BARU	Jl. Pangsuma, Benua Melayu Laut	PTK SELATAN	-	-	-	4	-	43	47	-	-	-	4	-	43	47	-	-	-	-	-	-	-
8	BLOK PASAR BERAS	Jl. Pangsuma, Benua Melayu Laut	PTK SELATAN	-	-	-	11	-	-	11	-	-	-	6	-	-	6	-	-	5	-	-	-	5
9	BLOK CITARUM	Jl. Asahan, Darat Sekip	PTK KOTA	-	72	48	-	-	-	120	-	72	35	-	-	-	107	-	-	13	-	-	-	13
10	BLOK CIMANDIRI	Jl. Asahan, Darat Sekip	PTK KOTA	-	78	54	-	-	-	132	-	77	28	-	-	-	105	-	1	26	-	-	-	27
11	BLOK CIUJUNG	Jl. Mahakam, Benua Melayu Laut	PTK SELATAN	-	88	60	-	-	-	148	-	87	21	-	-	-	108	-	1	39	-	-	-	40
12	BLOK CITANDUI	Jl. Mahakam, Benua Melayu Laut	PTK SELATAN	-	84	60	-	-	-	144	-	80	7	-	-	-	87	-	4	53	-	-	-	57
13	BLOK INDRAGIRI BARAT	Jl. Indragiri Barat, Benua Melayu Laut	PTK SELATAN	-	92	-	-	-	-	92	-	92	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-
14	BLOK INDRAGIRI TIMUR	Jl. Indragiri Timur, Benua Melayu Laut	PTK SELATAN	-	87	-	-	-	-	87	-	87	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-
15	BLOK BUKIT TIMAH	Jl. Asahan, Darat Sekip	PTK KOTA	-	40	40	-	-	-	80	-	15	-	-	-	-	15	-	25	40	-	-	-	65
11	EKS. TERMINAL SIANTAN																							
1	TOKO PARIT WAN SALIM	Jl. Parit Wan Salim, Siantan Tengah	PTK UTARA	-	-	-	-	4	25	29	-	-	-	-	-	4	22	26	-	-	-	-	3	3
2	TOKO STANPLAT OTO	Jl. Khatulistiwa, Kel Siantan Tengah	PTK UTARA	-	-	-	-	9	29	38	-	-	-	-	-	9	29	38	-	-	-	-	-	-
12	TOKO JL SISINGAMANGARAJA	Jl. Sisingamangaraja, Kel Darat Sekip	PTK KOTA	-	-	-	27	-	-	27	-	-	-	-	27	-	-	27	-	-	-	-	-	-
13	PASAR HARAPAN JAYA	Jl. Harapan Jaya, Kel Kota Baru	PTK SELATAN	32	12	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	32	12	-	-	-	44
14	PASAR PURING II	Jl. Khatulistiwa, Kel Siantan Tengah	PTK UTARA	78	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	78
15	PASAR PARWASAL	Jl. Khatulistiwa, Kel Siantan Tengah	PTK UTARA	147	-	-	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-	147	-	-	-	-	-	147
	- Kios Menghadap Dalam			-	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13
	- Kios Menghadap Luar			-	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	14
16	PASAR TERMINAL AGRIBISNIS	Jl. Budi Utomo, Siantan Tengah	PTK UTARA	140	7	-	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-	140	7	-	-	-	-	147
17	PASAR KAPUAS INDAH	Jl. Kapten Marsam, Kel Darat Sekip	PTK KOTA	-	-	241	-	-	-	241	-	-	227	-	-	-	227	-	-	14	-	-	-	14
	- Kios Lt.I			-	54	-	-	-	-	54	-	54	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-
	- Kios LD A,F			-	171	-	-	-	-	171	-	171	-	-	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-
	- Kios LD C,D,E			-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	- LD F(3),F(5)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PASAR PSP																							
	a.BLOK PATTIMURA :			-	66	-	-	-	-	66	-	66	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-
	- Kios 1.5 x 7.2 m			-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	- Kios 1.5 x 4 m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.BLOK AR HAKIM :	Jl. AR Hakim, Kel Darat Sekip	PTK KOTA	-	48	-	-	-	-	48	-	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			3.556	1.898	1.230	42	45	97	6.868	2.907	1.734	823	37	45	94	5.640	649	164	407	5	-	3	1.228

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak





Berdasarkan data kapasitas sarana perdagangan yang meliputi jumlah kapasitas ruangan, jumlah ruang terisi, dan jumlah ruang kosong pada beberapa pasar di Kota Pontianak, dapat diketahui tingkat pemanfaatan sarana perdagangan oleh para pedagang sebagai salah satu indikator kinerja dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Dari hasil pengolahan data tersebut terlihat bahwa pasar dengan jumlah pedagang terbanyak (ruang terisi) adalah Pasar Flamboyan dengan jumlah ruang terisi sebanyak 1.766 unit dari total kapasitas sekitar 1.770 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sarana perdagangan pada pasar tersebut sudah sangat optimal. Tingginya tingkat keterisian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain lokasi pasar yang strategis, tingginya mobilitas masyarakat, serta keberagaman komoditas yang diperdagangkan sehingga menjadikan pasar tersebut sebagai salah satu pusat perdagangan utama di Kota Pontianak.

Sebaliknya, terdapat beberapa pasar yang memiliki jumlah ruang terisi relatif sedikit dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia, sehingga tingkat pemanfaatannya masih belum optimal. Rendahnya tingkat keterisian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan jumlah pengunjung, lokasi pasar yang kurang strategis, kurangnya variasi komoditas yang diperdagangkan, serta adanya persaingan dengan pusat perdagangan lain seperti toko modern maupun pusat perbelanjaan.

Selain itu, perkembangan pola perdagangan masyarakat yang semakin beragam, termasuk meningkatnya transaksi melalui perdagangan modern dan platform digital, juga turut mempengaruhi minat pedagang dalam memanfaatkan ruang usaha di pasar rakyat. Hal ini menyebabkan pedagang cenderung memilih lokasi usaha yang memiliki tingkat keramaian dan potensi transaksi yang lebih tinggi.

Dengan demikian, pengelolaan sarana distribusi perdagangan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tingkat pemanfaatan ruang usaha dapat meningkat, sehingga mampu memperkuat peran pasar rakyat sebagai



penggerak perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Membandingkan relisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan	80%	82.12%	80%	103%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah dalam dokumen RENSTRA organisasi, dapat diketahui bahwa indikator Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan ditetapkan sebesar 80 persen, baik untuk target tahunan maupun target RENSTRA. Realisasi kinerja yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar 82,12 persen atau mencapai 103 persen dari target RENSTRA, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Nasional
	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan	82.12%	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak



Realisasi Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan tahun 2025 sebesar 82,12%, sedangkan Standar Nasional belum diketahui sehingga dapat disimpulkan realisasi tidak dapat diketahui. Tidak ditemukannya standar nasional disebabkan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat guna meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana guna kelancaran pendistribusian perdagangan di daerah tersebut.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang dilakukan	Rekomendasi/Rencana Tindak lanjut
	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan	- fasilitasi pengelolaan sarana secara intensif di 15 titik wilayah kerja untuk memastikan sarana tetap berfungsi optimal. - Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan pedagang guna meningkatkan standar pelayanan pasar.	Memberikan kemudahan akses pendaftaran bagi calon pedagang melalui fasilitasi pengelolaan sarana distribusi yang lebih responsif	- Meningkatkan strategi promosi sarana distribusi yang masih memiliki sisa kuota (1.228 kapasitas) agar mencapai okupansi 100% - Mengagendakan pemeliharaan sarana secara berkala untuk menjaga minat pedagang tetap bertahan di lokasi binaan.

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak



Realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2025 persentase jumlah sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan adalah Pasar yang letaknya strategis dan akses pasar yang mudah.

Kendala yang dihadapi untuk pencapaian target persentase jumlah sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan adalah:

1. Lantai atas pada pasar bertingkat tidak ada pengunjung;
2. Kesadaran membayar biaya pemanfaatan, masih rendah dan tidak tepat waktu;
3. Tingkat keamanan masih rendah.

Upaya kedepan yang dilakukan untuk pencapaian target persentase jumlah sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan adalah:

1. Mengoptimalkan BKPM, Asosiasi dan pelaku usaha/pedagang untuk menjaga keamanan pasar.
2. Melaksanakan event – event yang menarik pengunjung untuk ke lantai 1 pada pasar bertingkat.

SASARAN STRATEGIS KE-2 : “ Terkendalinya ketersediaan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya ”

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	%
1.	Terkendalinya ketersediaan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya	Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya	100%	124%	124%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Dari tabel di atas pada Sasaran Strategi Pemerintah Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya



Indikator Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya Tahun 2025 realisasinya sebesar 124% atau tercapai 124% dari target yang ditetapkan 100%. Rumus dalam IKU sebagai berikut :

stock awal + Pengadaan	X 100%
Penyaluran	

Realisasinya sebesar 124% diperoleh dari jumlah stok awal sembako ditambah jumlah pengadaan sembako dan dibagi dengan jumlah penyaluran sembako. Jumlah stok awal sembako adalah sebanyak 455.791, Jumlah pengadaan sembako adalah sebanyak 1.718.041 dan jumlah penyaluran sembako adalah sebanyak 1.754.005. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya tahun 2025 dikategorikan **“Sangat Berhasil”**. Sehubungan dengan Pencapaian Indikator Sasaran 124% di karenakan bahwa secara umum ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di tahun 2025 hingga akhir tahun mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Pontianak. Hal ini dapat dilihat dari persediaan akhir/stok akhir rata-rata komoditi yang dipantau masih tersedia, kecuali komoditi bawang putih, bawang bombai, kacang hijau dan kemiri tanpa persediaan akhir, hal ini disebabkan oleh pelaku usaha menerapkan strategi pengelolaan stok secara efisien dengan menjaga jumlah stok minimum di gudang dan mengandalkan pasokan yang datang secara berkala dari pemasok. Strategi ini bertujuan untuk menghindari penumpukan barang serta mengurangi risiko kerusakan atau penurunan kualitas komoditi selama proses penyimpanan. Perincian STOK SEMBAKO per komoditi dapat dilihat pada tabel berikut :



REKAPITULASI STOK SEMBAKO PER KOMODITI TAHUN 2025

NO	KOMODITI	SATUAN	STOK AWAL	PENGADAAN	PENYALURAN	STOK AKHIR	KET
1	BERAS	TON	143.872	6.032	5.634	144.271	MENCUKUPI
2	BAWANG MERAH	TON	20	128	113	35	MENCUKUPI
3	BAWANG PUTIH	TON	-	110	110	-	MENCUKUPI
4	BAWANG BOMBAI	TON	-	30	30	-	MENCUKUPI
5	GULA PASIR	TON	15.301	27.989	24.108	19.182	MENCUKUPI
6	KACANG HIJAU	TON	6	20	26	-	MENCUKUPI
8	KEMIRI	TON	3	3	6	-	MENCUKUPI
9	KEDELAI	TON	1.066	24	574	516	MENCUKUPI
10	MINYAKITA	LITER	3.648	21.600	19.788	5.460	MENCUKUPI
11	MINYAK GORENG	LITER	291.875	1.662.106	1.703.616	250.364	MENCUKUPI
JUMLAH			455.791	1.718.041	1.754.005	419.827	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Selain itu, secara keseluruhan komoditi yang dipantau ini, jumlah persediaan awal ditambah dengan pengadaan jauh lebih besar dibanding dengan jumlah penyaluran bahkan jumlah pengadaan kurang lebih sama dengan besaran jumlah penyaluran.

NO	KOMODITAS PANGAN	KETERSEDIAAN (Ton)	KEBUTUHAN (Ton)	SURFLUS (Ton)	KETERANGAN
1	Beras	3552,18	1332,04	2232,4	Surplus (cukup tersedia)
2	Jagung Pipil	33,69	14,29	19,4	Surplus (cukup tersedia)
3	Bawang Merah	56,1	20,92	35,18	Surplus (cukup tersedia)
4	Bawang Putih	40,45	20,05	20,4	Surplus (cukup tersedia)
5	Cabe Besar	17,9	6,75	11,15	Surplus (cukup tersedia)
6	Cabe rawit	32,88	17,18	15,7	Surplus (cukup tersedia)
7	Daging Sapi	54,66	24,74	29,92	Surplus (cukup tersedia)
8	Daging Ayam Ras	361,87	181,18	180,69	Surplus (cukup tersedia)
9	Telur Ayam Ras	279,29	166,59	112,7	Surplus (cukup tersedia)
10	Gula Pasir	256,38	108	148,38	Surplus (cukup tersedia)
11	Minyak Goreng	266,31	150,19	116,12	Surplus (cukup tersedia)

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Berdasarkan data Neraca ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan akhir tahun 2025 (bulan Desember) yang diperoleh dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, dapat dilihat bahwa rata-rata mengalami surplus. Hal ini menunjukkan ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat di Kota Pontianak sangat mencukupi, yang dapat dilihat dari jumlah ketersediaan dibandingkan dengan kebutuhan masih lebih besar.



Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya dikategorikan "**Sangat Berhasil.**" Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **124%**.

Didukung dengan :

a. Analisis atas efisiensi sumber daya

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Terkendalinya ketersediaan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	54.734.304	49.411.119	90.27	100	
2.		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.514.860.979	1.345.838.678	88.84	100	
3.		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	239.749.800	222.143.245	92.66	100	
4.		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	648.578.700	587.899.814	90.64	194	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Operasional Program dan kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan program dan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan , indikator : <i>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan</i>	100%	100%	100	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
1.1	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat, indikator : <i>Jumlah Fasilitas Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C</i>	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Realisasi indikator Kegiatan (1 kegiatan) sesuai dengan target (1 kegiatan). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".



1.1.1	Sub kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C, indikator : <i>Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	1 dokumen	1 dokumen	100	Realisasi indikator Sub Kegiatan (1 dokumen) sesuai dengan target (1 dokumen). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, indikator : 1. <i>Persentase Koefisien variasi harga antar waktu</i> 2. <i>Persentase kinerja realisasi pupuk</i>	3% 60%	2,3% 98,20%		Realisasi indikator Program (2,3%) lebih kecil dari target (3%). Realisasi indikator Program (98,20%) lebih besar dari target (60%).
2.1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, indikator : <i>Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>	12 bulan	12 bulan	100%	Realisasi indikator Kegiatan (12 bulan) sama dengan target (12 bulan). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
2.1.1	Sub kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, indikator : <i>Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.</i>	12 Laporan	12 Laporan	100%	Realisasi indikator Sub Kegiatan (12 laporan) sama dengan target (12 laporan). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
2.2	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, indikator : <i>Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar</i>	12 laporan	12 laporan	100%	Realisasi indikator Sub Kegiatan (12 laporan) sama dengan target (12 laporan). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
2.2.1	Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, indikator : <i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	12 laporan	12 laporan	100%	Realisasi indikator Sub Kegiatan (12 laporan) sama dengan target (12 laporan). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
2.2.2	Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, indikator : <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	3 laporan	5 laporan	250%	Realisasi indikator Sub Kegiatan (5 laporan) lebih besar dari target (2 laporan). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (250%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, indikator : <i>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTPP) bertanda tera sah yang berlaku</i>	100 %	100%	100%	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, indikator : <i>Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</i>	18000 UTTP	20819 UTTP	115%	Realisasi indikator Kegiatan (20819 UTTP) lebih besar dari target (18000 UTTP). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (115%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
3.1.1	Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, indikator : <i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	18000 UTTP	20819 UTTP	115%	Realisasi indikator Sub Kegiatan (20819 UTTP) lebih besar dari target (18000 UTTP). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (115%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
4	Program Penggunaan dan Pemasaran	0.4%	0.776%	194%	Realisasi indikator Program



	Produk Dalam Negeri, indikator : Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.				(0,776%) lebih besar dari target (0,4%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (194%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
4.1	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, indikator : Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12 bulan	12 bulan	100%	Realisasi indikator Kegiatan (75 usaha) sama dengan target (75 usaha). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
4.1.1	Sub kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, indikator : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	30 UMKM	100%	Realisasi indikator Kegiatan (30 usaha) sama dengan target (30 usaha). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
4.1.2	Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, indikator : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran Produk Dalam Negeri melalui retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	75 UMKM	75 UMKM	100%	Realisasi indikator Kegiatan (75 usaha) sama dengan target (75 usaha). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1.	Terkendalinya ketersediaan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya	Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya	100%	100%	125%	124%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut:

PERSENTASE TINGKAT KECUKUPAN STOK SEMBAKO DAN BARANG PENTING LAINNYA

Dari tabel dapat terlihat bahwa target Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya pada tahun 2025 mencapai 124%, yang artinya Stok SEMBAKO mencukupi dan masih tersedia untuk tahun berikutnya. Untuk tahun 2025 di masa pemulihan ekonomi ini stok SEMBAKO tetap terjaga. Hal ini karena berbagai upaya melakukan sosialisasi untuk mengurangi *panic buying*. Dibandingkan target 100%



pencapaian Indikator Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

3. Membandingkan relisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
	Terkendalinya ketersediaan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya	Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya	100%	124%	100%	100%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2025 sebesar 124% masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dapat tercapai

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Nasional
	Terkendalinya ketersediaan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya	Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya	124%	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Realisasi Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya Tahun 2025 sebesar 124%, sedangkan Standar Nasional belum diketahui sehingga dapat disimpulkan realisasi tidak dapat diketahui.

Standar Nasional untuk indikator kinerja utama terkait kecukupan stok sembako dan barang penting lainnya belum ditentukan jumlah pastinya oleh Kementerian perdagangan, karena di setiap daerah harus dapat menjaga stok sembako dan barang pentingnya lainnya untuk kecukupan di daerah.



Namun ada program penunjang yang memberikan prestasi yang baik di Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah. Adapun program yang menunjang yaitu Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan indikator program: Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku berupa penghargaan tingkat Nasional yaitu sebagai penerima penghargaan pasar tertib ukur tahun 2024 sesuai dengan surat keputusan direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga nomor 230 tahun 2025 tentang penetapan pasar tertib ukur tahun 2024 tanggal 12 juni 2025 wilayah BSML Regional III Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak sebanyak 8 pasar (SK dan Sertifikat terlampir) yaitu:

1. Pasar Flamboyan
2. Pasar Kemuning
3. Pasar Dahlia
4. Pasar Teratai
5. Pasar Tengah
6. Pasar Mawar
7. Pasar Nipah Kuning
8. Pasar Swadaya Sungai Raya Dalam

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi yang dilakukan	Rekomendasi/Rencana Tindak lanjut
	Terkendalinya ketersediaan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya	Persentase tingkat kecukupan stok SEMBAKO dan barang penting lainnya	Kesulitan dalam koordinasi dengan pimpinan pelaku usaha/pemilik/pengambil keputusan pihak Distributor/Agen untuk melakukan rapat koordinasi	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak distributor/agen agar pelaksanaan	Akan ditingkatkan koordinasi dan monitoring serta pengawasan terhadap pelaku usaha Distributor/Agen bahan pokok dan barang penting.



			(menunggu pembentukan perhimpunan Distributor/Agen Beras/Bahan Pokok)	monitoring lebih lancar.	
--	--	--	---	--------------------------	--

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Pencapaian tahun 2025 mencapai 100 persen dan masuk dalam kategori sangat berhasil karena Stok SEMBAKO mencukupi sepanjang tahun 2025. Upaya kedepan untuk menjaga ketersediaan stok SEMBAKO di Kota Pontianak adalah melakukan peningkatan koordinasi dan monitoring serta pengawasan terhadap pelaku usaha Distributor/Agen bahan pokok dan barang penting.

SASARAN STRATEGIS KE-3: “Meningkatnya Pelaku Industri Kecil”

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja DKUMP Kota Pontianak Tahun 2025 yaitu Pelaku Industri Kecil yang tumbuh masih dibawah target hal ini tercermin dengan capaian Indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil, dilihat pada Tabel berikut:

Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelaku Industri Kecil	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil	2,60%	1,33%	51,1%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Dari tabel pada Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:



$\frac{\Sigma \text{ industri Tahun } n - \Sigma \text{ industri Tahun } n-1}{\Sigma \text{ industri Tahun } n-1}$	X 100%

Indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil Tahun 2025 realisasinya sebesar 1,33% atau tidak tercapai 51,1% dari target yang ditetapkan 2,6%. Realisasinya sebesar 1,33% diperoleh dari jumlah pelaku industri kecil tahun 2025 dikurangi jumlah pelaku industri kecil tahun 2024 dan dibagi dengan jumlah industri kecil tahun 2024. Jumlah pelaku industri kecil tahun 2025 adalah sebanyak 3.651 industri dan jumlah industri kecil tahun 2024 adalah sebanyak 3.532 industri. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil dikategorikan "**Tidak Berhasil**". dikarenakan data ini di dapat dari sistem OSS (*Online Single Submassion*) dimana masih banyak pelaku industri terutama industri rumah tangga yang belum memiliki kesadaran untuk membuat atau memiliki NIB dengan klasifikasi industri sehingga perlu didorong untuk pembuatan NIB dengan KBLI sesuai klasifikasi usaha yang bersangkutan. Melihat dari data yang disampaikan dengan perbandingan data tahun 2024 dan 2025 maka industri itu sendiri tumbuh akan tetapi masih dibawah target yang ditetapkan, target disampaikan perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengingat bahwa Kota Pontianak merupakan kota jasa dan perdagangan sehingga aktifitas jasa dan perdagangan menjadi indikator yang mengalami perkembangan dibandingkan industri terutama industri rumah tangga.

REKAPAN DATA INDUSTRI MIKRO DAN KECIL DI KOTA PONTIANAK

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2025	3.651
2	2024	3.532
3	2023	2.897
4	2022	1.462

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak



a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional Program dan kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan program dan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp. 2.681.565.286,- atau 90,02% dari pagu Rp. 2.978.788.033,-. Tidak terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasikan untuk program kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pelaku Industri Kecil	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.941.161.033	2.645.114.810	89.93	100	
2.		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	37.627.000	36.450.476	96.87	100	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

b. Analisis Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

Sasaran strategis ke -3 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah untuk Meningkatkan Pelaku Industri Kecil, dengan indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil. Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri , indikator : <i>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</i>	100%	100%	100	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.1	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, indikator : <i>Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA</i>	1 dokumen	1 dokumen	100	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.1.1	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, indikator : <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.</i>	1 dokumen	1 dokumen	100	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.1.2	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, indikator : <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.</i>	1 dokumen	1 dokumen	100	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.1.3	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, indikator : <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	1 dokumen	1 dokumen	100	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.1.4	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, indikator : <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1 dokumen	1 dokumen	100	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.1.5	Sub kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota, indikator : <i>Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat Diawasi -</i>	100 dokumen	100 dokumen	100	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator



	Jumlah Program Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat Diimplementasikan				Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri, indikator : <i>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait</i>	80%	80%	100	Realisasi indikator Program (80%) sama dengan target (80%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
2.1	Kegiatan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, indikator : Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri	1 dokumen	1 dokumen	100	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota, indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	1 dokumen	1 dokumen	100	Realisasi indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Capaian
	Utama		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Kinerja
			2022	2023	2024	2025	Tahun
							2025
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)		(8)	(9)



I	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU INDUSTRI KECIL	2,60%	33,33%	61,11%	21,92%	1,33%	51.1%
---	---	-------	--------	--------	--------	-------	-------

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut:

PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU INDUSTRI KECIL

Terlihat bahwa realisasi capaian pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil setiap tahunnya cukup berfluktuatif, sehingga capaian Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil tahun 2025 dari target 2,60% terealisasi 1,33% atau 51.1% masuk dalam kategori **Tidak Berhasil**. masih kurangnya motivasi dari para pelaku Industri kecil, mikro dan rumah tangga untuk membuat NIB (Nomor Induk Berusaha)/ perizinan dan masih banyak yang salah dalam penginoutan atau pengisian KBLI Industri.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan Target Capaian Tahun 2025 tidak mencapai Target yang ditetapkan. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target dapat dilihat pada Tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU INDUSTRI KECIL	2,60%	1,33%	2,6%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak





Berikut ini Analisis Capaian Kinerja masing – masing Indikator :

PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU INDUSTRI KECIL

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2025 sebesar 2,60%, Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2025 sebesar 1,33% dan masuk dalam kategori **Tidak Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 tidak dapat tercapai.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU INDUSTRI KECIL	2,60%	1,33%	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu sebagai berikut :

PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU INDUSTRI KECIL

Realisasi persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil Tahun 2025 sebesar 1,33%, sedangkan Standar Nasional belum diketahui sehingga dapat disimpulkan realisasi tidak dapat diketahui. Pada skala Nasional, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian tidak menargetkan standar secara nasional disebabkan karena tanggung jawab pengawasan dan pembinaan pelaku usaha berdasarkan skala usaha yang berbeda untuk masing masing tingkatan pemerintah daerah. Dimana untuk



pemerintahan daerah Kabupaten/Kota skala usaha untuk mikro dan kecil, sedangkan untuk tingkat provinsi skala usaha sedang, sedangkan untuk skala usaha besar dibebankan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu tidak adanya standar nasional yang ditetapkan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel dibawah ini menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Tabel III.18
Tabel Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja
Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan
di Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU INDUSTRI KECIL	Penurunan	1. Kurangnya kesadaran pelaku industri kecil, mikro dan rumah tangga untuk membuat izin 2. Banyak pelaku industri yang belum mengerti prosedur dalam pembuatan perizinan 3. Tumbuhkembang <i>platform</i> digital sehingga juga sempat membuat banyak reseller menghentikan kerja sama dengan IKM lokal, yang mengakibatkan keberlangsungan produksi 4. Kurangnya kemandirian para pelaku industri kecil dan rumah tangga untuk tumbuh kembang dan masih perlu dorongan untuk promosi dan pengembangan sarana serta prasarana. 5. Aktifitas jasa dan perdagangan tumbuh kembang sehingga aturan industri tidak mendukung hal	1. Terus melakukan sosialisai atau workshop dan pendampingan dalam pembuatan perizinan industri 2. Memberikan stimulus bagi pelaku industri baru untuk tumbuh kembang seperti sapras 3. Mengenalkan dan sosialisai dalam menggunakan akses digital atau menjadi bagian dalam pemasaran dengan platform nasional 4. Pendampingan kepada wirausaha baru akan dampak positif dan benefit dalam tumbuh kembang industri seperti masuk dalam e-katalog dan sosialisasi pembekalan entrepreneur bagi wirausaha industri baru



No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
			tersebut salah satunya adalah kawasan industri yang tidak dapat diterapkan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Dari Tabel dapat disampaikan Analisis keberhasilan dan Solusi mempertahankan kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU INDUSTRI KECIL

Realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2025 persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil sebesar 1,33% atau 51.1% dari target termasuk dalam kategori **Tidak Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 tidak dapat tercapai. Pelaku industri ini sendiri tumbuh akan tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan

Kendala yang dihadapi untuk pencapaian persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil adalah:

1. Kurangnya kesadaran pelaku industri kecil, mikro dan rumah tangga untuk membuat izin
2. Banyak pelaku industri yang belum mengerti prosedur dalam pembuatan perizinan
3. Tumbuh kembang *platform* digital sehingga juga sempat membuat banyak reseller menghentikan kerja sama dengan IKM lokal, yang mengancam keberlangsungan produksi
4. Kurangnya kemandirian para pelaku industri kecil dan rumah tangga untuk tumbuhkembang dan masih perlu dorongan untuk promosi dan pengembangan sarana serta prasarana.
5. Aktifitas jasa dan perdagangan tumbuh kembang sehingga aturan industri tidak mendukung hal tersebut salah satunya adalah kawasan



industri yang tidak dapat diterapkan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri.

Upaya kedepan yang dilakukan untuk pencapaian persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil adalah:

1. Terus melakukan sosialisasi atau workshop dan pendampingan dalam pembuatan perizinan industri
2. Memberikan stimulus bagi pelaku industri baru untuk tumbuh kembang seperti sarana dan prasarana
3. Mengenalkan dan sosialisasi dalam menggunakan akses digital atau menjadi bagian dalam pemasalahan dengan *platform* nasional
4. Pendampingan kepada wirausaha baru akan dampak positif dan benefit dalam tumbuh kembang industri seperti masuk dalam *e-katalog* dan sosialisasi pembekalan *entrepreneur* bagi wirausaha industri baru

SASARAN STRATEGIS KE-4: “Meningkatnya Koperasi yang Aktif”

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja DKUMP Kota Pontianak Tahun 2025 yaitu Meningkatkan Koperasi yang Aktif yang tercermin dengan capaian Persentase Koperasi Aktif dilihat pada Tabel berikut:

Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	Persentase Koperasi Aktif	97,50%	93,24%	95,63%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak



PERSENTASE KOPERASI AKTIF

Indikator Persentase Koperasi Aktif Tahun 2025 realisasinya sebesar 93,24% atau tercapai 95,63% dari target yang ditetapkan 97,50%.

Σ Koperasi Aktif	X 100%
Σ Koperasi seluruhnya - Σ Koperasi yang dibubarkan	

Realisasinya sebesar 93,24% diperoleh dari koperasi aktif dibagi dengan koperasi seluruhnya dikurangi koperasi yang dibubarkan. Koperasi aktif adalah sebanyak 510 koperasi dan jumlah koperasi seluruhnya adalah sebanyak 547 koperasi. Jumlah koperasi yang dibubarkan telah terhapus dari data ODS (*Online Data Sistem*), yang mana pada tahun-tahun sebelumnya data tersebut tidak bisa dihilangkan dari sistem. Pembubaran koperasi tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi Nomor: 114/KEP/M.KUKM.2/XII 2016 tentang Pembubaran Koperasi. Jadi dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi Aktif dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

**Tabel Data Koperasi Aktif
Kota Pontianak**

Tahun	Koperasi Aktif	Koperasi Yang Telah Dibubarkan	Koperasi Keseluruhan
2020	492	296	815
2021	485	296	808
2022	485	296	808
2023	484	296	808
2024	482	296	807
2025	510	0	547

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak



a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI	
			TARGET	REALISASI	%		ANGGARAN	%
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 11.440.000,00	Rp 10.873.679,00	95,05	100		
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 2.435.680,00	Rp 2.107.385,00	86,52	100		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 866.966.800,00	Rp 852.813.287,00	98,37	100		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 96.900.180,00	Rp 96.380.073,00	99,46	100		
		JUMLAH	Rp 977.742.660,00	Rp 962.174.424,00	98,41			

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional Program dan kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan program dan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp. 962.174.424,- atau 98,41% dari pagu Rp. 977.742.660,-.

b. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja :

Sasaran strategis Pemerintah Kota Pontianak adalah untuk meningkatkan Koperasi yang Aktif. Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN GAGAL/BERHASIL
4	Meningkatnya Koperasi Yang Aktif : Persentase Koperasi Aktif : 97,50%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan indikator program : Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	40%	12,35%	30,88%	Realisasi indikator Program 12.35% lebih besar dari target 40%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 30,88%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota , dengan indikator kegiatan : Jumlah Koperasi yang di periksa dan awasi	512 koperasi	63 koperasi	12,30%	Realisasi indikator Kegiatan 63 koperasi lebih kecil dari target 512 koperasi. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 12.30%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".
		Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota, indikator : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan.	485 koperasi	63 koperasi	12,99%	Realisasi indikator Sub Kegiatan 63 koperasi lebih kecil dari target 485 koperasi. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 12.99%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi , dengan indikator program : Persentase KSP/USP yang menilai SEHAT	6%	6,98%	116.28%	Realisasi indikator Program 6.98% lebih besar dari target 6%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 116.28%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan : Jumlah KSP/USP yang menilai SEHAT	10 Unit usaha	12 Unit usaha	120%	Realisasi indikator Kegiatan 12 unit lebih besar dari target 10 unit. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 120%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator Sub kegiatan : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	130 Unit usaha	60 Unit usaha	46.15%	Realisasi indikator Sub Kegiatan 60 unit lebih kecil dari target 130 koperasi. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 46.15%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian , dengan indikator program : Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	40%	9.14%	22.85%	Realisasi indikator Program 9.14% lebih kecil dari target 40%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 22.85%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan : Jumlah anggota Koperasi yang dilatih	180 orang	50 orang	27.78%	Realisasi indikator Kegiatan 50 orang lebih kecil dari target 180 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 27.78%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan indikator Sub kegiatan : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	400 orang	50 orang	12.5%	Realisasi indikator Sub Kegiatan 50 orang lebih kecil dari target 400 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 12.5%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".



Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator program : Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	95%	5.3%	5.58%	Realisasi indikator Program 5.3% lebih kecil dari target 95%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 5.58%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan : Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Realisasi indikator Kegiatan 1 kegiatan dan sesuai target 1 kegiatan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha, dengan indikator Sub kegiatan : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	120 unit usaha	29 unit usaha	24.17%	Realisasi indikator Sub Kegiatan 29 unit dan sesuai target 120 unit. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 24.17%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)		(8)	(9)
I	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	97,50%	94,9%	94,72%	94,72%	94.32%	93,24%	97,50%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut :

I. PERSENTASE KOPERASI AKTIF

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Persentase Koperasi aktif mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini terlihat pada capaian di Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025. Namun capaian tersebut masih berada diatas 85% sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi aktif masuk pada kategori **"Sangat Berhasil"**.



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan Target Capaian Tahun 2025 sudah mencapai Target yang ditetapkan. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target dapat dilihat pada Tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	97.50%	93,24%	97.50%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja masing – masing Indikator:

PERSENTASE KOPERASI AKTIF

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2025 sebesar 97,50%, kemudian realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2025 sebesar 93,24% atau 97,50% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 akan dapat tercapai.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Standar Nasional
Kinerja Utama				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	97,50%	93,24%	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu sebagai berikut :

PERSENTASE KOPERASI AKTIF

Realisasi tahun 2025 yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak pada Indikator Kinerja Utama persentase koperasi aktif sebesar 93,24% sedangkan Standar Nasional belum diketahui sehingga dapat disimpulkan realisasi tidak dapat diketahui. Standar Nasional untuk Koperasi Aktif tidak ada ditetapkan secara nasional, hal ini disebabkan karena masing-masing daerah diharapkan terus melakukan pembinaan pada semua koperasi yang ada dan terus melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan sehingga koperasi yang ada dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi anggotanya.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada Tabel berikut menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.



Tabel Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	Penurunan	1. Disebabkan oleh kelemahan internal (manajemen, modal, SDM) dan faktor eksternal (persaingan, regulasi, serta rendahnya kesadaran anggota). Akibatnya, banyak koperasi tidak mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan sehingga status "aktif" sulit dipertahankan.	1. Penguatan Manajemen dan Tata Kelola, Akses Permodalan yang Lebih Inklusif, dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus dan Pengawas Koperasi.. 2. Memperkuat fungsi pengawasan koperasi agar koperasi tidak hanya terdaftar tetapi benar-benar beroperasi..

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Dari Tabel III.24, dapat disampaikan Analisis keberhasilan dan Solusi mempertahankan kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

PERSENTASE KOPERASI AKTIF

Persentase koperasi aktif di Tahun 2025 yaitu sebesar 93,24%, mengalami sedikit penurunan dengan tahun sebelumnya yaitu 94,32%. Walaupun mengalami penurunan, tetapi masih mencapai target yakni sebesar 97,50%. Hal ini disebabkan oleh beberapa koperasi yang naik kelas menjadi binaan Provinsi. Selain itu upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan persentase Koperasi Aktif adalah menjaga Koperasi Aktif agar tidak turun menjadi Koperasi Tidak Aktif melalui monitoring dan motivasi RAT.

Adapun faktor yang menghambat koperasi aktif adalah:

1. Sumber daya manusia Koperasi masih belum memadai.
2. Kurangnya pemahaman gerakan Koperasi dalam penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi dan partisipasi, pengawasan anggota dan pengelolaan koperasi untuk pengembangan koperasi.
3. belum adanya pengembangan sistem yang memudahkan perangkat koperasi melaporkan aktivitas kelembagaannya.



4. Belum optimal Koperasi dapat meningkatkan produk unggulan daerah menjadi komoditas ekspor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa daerah.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah:

1. Terus meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga koperasi.
2. Terus meningkatkan kompetensi SDM koperasi.
3. Terus meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan.
4. Terus meningkatkan partisipasi anggota terhadap usaha koperasi.
5. Terus meningkatkan Kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga.
6. Terus meningkatkan unit usaha yang dikelola koperasi.

SASARAN STRATEGIS KE-5: “Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro”

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja DKUMP Kota Pontianak Tahun 2025 yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang tercermin dengan capaian Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru dilihat pada Tabel berikut:

Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	5,50%	21,41%	389,27%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Dari tabel diatas pada Sasaran Strategis DKUMP Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru



$\frac{\Sigma \text{ Usaha Mikro Tahun } n - \Sigma \text{ Usaha Mikro Tahun } n-1}{\Sigma \text{ Usaha Mikro Tahun } n-1}$	$\times 100\%$
---	----------------

Indikator Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru Tahun 2025 realisasinya sebesar 21,41% atau tercapai 389,27% dari target yang ditetapkan 5,50%. Realisasinya sebesar 21,41% diperoleh dari jumlah Usaha Mikro tahun 2025 dikurangi jumlah Usaha Mikro tahun 2024 dan dibagi dengan jumlah Usaha Mikro tahun 2024. Jumlah Usaha Mikro tahun 2025 adalah sebanyak 76.736 Unit Usaha dan jumlah Usaha Mikro tahun 2024 adalah sebanyak 63.202 Unit Usaha. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

**Tabel Produktivitas Koperasi & Usaha Mikro
Kota Pontianak**

Tahun	Usaha Mikro	Usaha kecil
2020	8.195	340
2021	12.541	1.457
2022	22.972	6.559
2023	45.085	12.190
2024	63.202	16.340
2025	76.736	19.757

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Sehubungan dengan Pencapaian Indikator Sasaran 21,41% dikarenakan dalam menetapkan target dalam rencana kerja tidak melihat trend pertumbuhan tahun tahun sebelumnya sehingga realisasinya menjadi lebih dari 100% yaitu 389,27%, sehingga untuk kedepannya akan diusulkan perubahan target kinerja masing-masing indikator. Selain itu adanya perubahan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyebabkan usaha yang ada menjadi berubah jenis usahanya, sebagai berikut:

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

No.	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta



2.	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Milyar
3.	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Milyar	> 2,5 Milyar - 50 Milyar

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

No.	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maksimal 1 Milyar	Maksimal 2 Milyar
2.	Usaha Kecil	> 1 Milyar - 5 Milyar	> 2,5 Milyar - 5 Milyar
3.	Usaha Menengah	> 5 Milyar - 10 Milyar	> 15 Milyar - 50 Milyar

Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib di miliki oleh setiap pelaku usaha, sebagai bukti pendaftaran dan legalitas untuk menjalankan kegiatan bisnis secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Dari tabel diuraikan Analisis efisiensi penggunaan untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI	
			TARGET	REALISASI	%		ANGGARAN	%
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 6.650.000,00	Rp 6.120.224,00	92.03	15.03	Rp. 529.776	7.97
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 1.918.602.650,00	Rp 1.876.531.960,00	97.81	98.62	Rp. 42.070.690	2.19
	JUMLAH		Rp 1.925.252.650,00	Rp 1.882.652.184,00	97.79		Rp 42.600.466,00	2.21

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

PERSENTASE PERTUMBUHAN USAHA MIKRO BARU

Untuk mencapai indikator kinerja utama OPD keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan



sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja langsung Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2025 untuk indikator ini mencapai Rp.1.882.652.184,- atau sekitar 97,79% dari Pagu Rp.1.925.252.650,-. Terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasikan untuk kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebesar Rp. 42.600.466,- (2,21%).

b. Analisis Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja:

Sasaran strategis Pemerintah Kota Pontianak adalah untuk meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro. Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN GAGAL/BERHASIL
5	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro : Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru : 5%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), dengan indikator program : Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	2.95%	0.44%	15.03	Realisasi indikator Program 0.44% lebih kecil dari target 2.95%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (15.03%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan , dengan indikator kegiatan : Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	50 unit usaha	60 Unit Usaha	120	Realisasi indikator Kegiatan 60 unit usaha lebih besar dari target sebanyak 50 unit usaha. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 120%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".



	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan indikator Sub kegiatan : Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	100 unit usaha	60 Unit Usaha	60	Realisasi indikator Sub Kegiatan 60 unit usaha lebih kecil dari target 100 unit usaha. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (60%). Indikator Kinerja masuk pada kategori " Cukup Berhasil ".
	Program Pengembangan UMKM , dengan indikator program : Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	0.37%	0.36%	98.62	Realisasi indikator Program 0.36% lebih kecil dari target 0.37%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (98.62%). Indikator Kinerja masuk pada kategori " Sangat Berhasil ".
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan indikator kegiatan : Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Realisasi indikator Kegiatan 1 kegiatan sama dengan dari target 1 kegiatan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori " Sangat Berhasil ".
	Pengembangan Usaha Mikro, dengan indikator Sub kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	280 unit usaha	280 unit usaha	100	Realisasi indikator Sub Kegiatan 280 unit usaha sama dengan dari target 280 unit usaha. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori " Sangat Berhasil ".

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(9)
I	PERSENTASE PERTUMBUHAN USAHA MIKRO BARU	5,50%	7,17	4,48%	40%	44,31%	21.41%	389.27%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut:



I. PERSENTASE PERTUMBUHAN USAHA MIKRO BARU

Dari tabel, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru, Pertumbuhan usaha mikro baru setiap tahunnya cukup berfluktuatif. Realisasi Indikatornya di Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan capaiannya melebihi target. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator persentase Pertumbuhan usaha mikro baru masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**. Hal ini disebabkan semakin tingginya kesadaran pelaku usaha untuk memperoleh legalitas usaha dan ditambah lagi kemudahan proses perizinannya di sistem OSS, dimana untuk usaha mikro dan kecil terbit otomatis tanpa verifikasi dari Dinas teknis.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan Target Capaian Tahun 2025 sudah mencapai Target yang ditetapkan. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PERSENTASE PERTUMBUHAN USAHA MIKRO BARU	5,50%	21,41%	5,50%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja masing – masing Indikator :

PERSENTASE PERTUMBUHAN USAHA MIKRO BARU



Pada Indikator ini, Target di Tahun 2025 sebesar 5.50%, dengan Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2025 sebesar 21.41% atau 389.27% dan masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Sedangkan jika realisasinya di tahun 2025 sebesar 21.41% dibandingkan dengan target Jangka Menengah Renstra sebesar 5,50%, dapat disimpulkan Indikator Kinerja pada Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru Tahun 2025 dan Jangka Menengah Renstra sangat berhasil.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	PERSENTASE PERTUMBUHAN USAHA MIKRO BARU	5,50%	21.41%	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu sebagai berikut :

I. PERSENTASE PERTUMBUHAN USAHA MIKRO BARU

Realisasi tahun 2025 yang dicapai oleh Pemerintah Kota Pontianak pada Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru sebesar 21.41% sedangkan Standar Nasional Tidak diketahui sehingga dapat disimpulkan realisasi capaian terhadap standar nasional tidak dapat diketahui.



Standar Nasional tidak diperoleh datanya karena di Kementerian Usaha Mikro kecil dan Menengah tidak menetapkan standar masing-masing daerah, hal ini disebabkan karena perbedaan kewenangan untuk masing-masing level daerah. Untuk Kota/kabupaten berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada skala mikro dan kecil, sedangkan di tingkat provinsi pada skala sedang, adapun tingkat pusat skala besar. Sehingga tidak dapat ditentukan skala secara nasional jika dibandingkan dengan skala daerah karena perbedaan level pengawasannya.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada Tabel berikut menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Tabel Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PERSENTASE PERTUMBUHAN USAHA MIKRO BARU	Peningkatan	1. pemberian izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana atau terintegrasi melalui online single submission (OSS).	1. Terus memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk melengkapi perizinan yang diperlukan untuk berusaha. 2. Terus melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku wirausaha. 3. Terus meningkatkan Kerjasama pemasaran baik secara online maupun offline.

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Dari Tabel diatas dapat disampaikan Analisis keberhasilan dan Solusi mempertahankan kinerja yang diuraikan sebagai berikut :



I. PERSENTASE PERTUMBUHAN USAHA MIKRO BARU

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah:

1. Terus memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk melengkapi perizinan yang diperlukan untuk berusaha.
2. Terus melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku wirausaha.
3. Terus meningkatkan Kerjasama pemasaran baik secara *online* maupun *offline*.



B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak pada tahun 2025 sesuai dengan dokumen perjanjian Kinerja dialokasikan anggaran dari APBD dan APBN,- dengan total anggaran sebesar Rp. 21.958.027.821,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.448.647.967 (93.13 %)

Adapun rincian anggaran dan realisasi program Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	11.440.000,00	10.873.679,00	95,05
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.435.680,00	2.107.385,00	86,52
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	866.966.800,00	852.813.287,00	98,37
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	96.900.180,00	96.380.073,00	99,46
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.650.000,00	6.120.224,00	92,03
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.918.602.650,00	1.876.531.960,00	97,81
7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	54.734.304,00	49.411.119,00	90,27
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	289.041.048,00	277.748.547,00	96,09
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.514.860.979,00	1.345.838.678,00	88,84
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	239.749.800,00	222.143.245,00	92,66
11	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	648.578.700,00	587.899.814,00	90,64
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.941.161.033,00	2.645.114.810,00	89,93
13	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	37.627.000,00	36.450.476,00	96,87
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.329.279.647,00	12.439.214.670	93,32
		21.958.027.821,00	20.448.647.967,00	93,13

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).
2. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak telah melaksanakan 5 (lima) sasaran dengan predikat "**Sangat Berhasil**"
3. Persentase pencapaian sasaran atau kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak secara umum dengan nilai rata – rata adalah **152,60** dan masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.
4. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan adalah :
 - a. Anggaran Pendapatan dengan target sebesar **Rp. 6.800.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp 6.348.181.000,-** atau sebesar **93,36%**.
 - b. Anggaran Belanja dengan target sebesar **Rp. 21.958.027.821,-** dengan realisasi **Rp. 20.448.647.967,-** atau sebesar **93,13%**.

B. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melengkapi sarana prasarana, kebijakan, pemantauan dan pembinaan kepada pelaku usaha Industri, Koperasi, usaha mikro dan perdagangan.
2. Pengembangan sistem pelaporan secara online./aplikasi bagi pelaku usaha
3. Memberikan pelatihan peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha Industri, Koperasi, usaha mikro dan perdagangan.



4. penguatan infrastuktur logistik pangan serta melakukan penguatan kerjasama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, utamanya pada komoditas daging ayam dan ikan tangkap.
5. mendorong masyarakat untuk swasembada komoditi pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
6. Melakukan percepatan administrasi pelaksanaan peningkatan dan penyediaan sarana prasarana penunjang perekonomian Kota Pontianak.
7. Mengoptimalkan peran dinas dalam pemantauan harga dan distribusi kebutuhan pokok melalui aplikasi terintegrasi.
8. Mengubah manajemen pengelolaan pasar rakyat yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan pasar yang ada.
9. Mengoptimalkan revisi Renstra tahun 2027 guna memperbaiki seluruh target indikator kinerja.

Pontianak, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak

Ibrahim, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda/ IVc
NIP.196902111990031005



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri	Laju PDRB sektor Perdagangan Laju PDRB sektor Industri Tingkat Inflasi	4,99% 4,77% 3 ± 1%	4,72% 0,69% 1,5%	94,59 14,47 100
2	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan	80%	82,12%	103
3	Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya	Persentase Tingkat Kecukupan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya	100%	124%	124
4	Meningkatnya Pelaku Industri Kecil	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil	2,60%	1,33%	51,15
5	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	Persentase Koperasi Aktif	97,50%	93,24%	95,63
6	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	5,50%	21,41%	389,27

Jumlah Total Anggaran Tahun 2025 : **Rp. 21.958.027.821,-**
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : **Rp. 20.448.647.967,-**

Pontianak, 30 Januari 2026



Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak

Ibrahim, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda/ IVc
NIP.196902111990031005

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

NOMOR 230 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PASAR TERTIB UKUR TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha dan masyarakat dalam transaksi perdagangan di pasar, pemerintah daerah berkewajiban memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terhadap kegiatan pembentukan Pasar Tertib Ukur, perlu ditetapkan pasar yang telah memenuhi kriteria sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Penetapan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG PENETAPAN PASAR TERTIB UKUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pasar di kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini, sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2024.

KEDUA : Menyatakan pasar di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi ketentuan dan

- memiliki lebih dari 85% Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan bertanda tera sah berlaku.
- KETIGA** : Memberikan piagam penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur kepada pasar yang berada di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di daerahnya khususnya di pasar dengan baik dan benar, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha serta meningkatkan kinerja bidang metrologi legal.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KEENAM** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



MOGA SIMATUPANG

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Gubernur terlampir;
3. Bupati/Walikota terlampir;
4. Ketua DPRD terlampir;
5. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi terlampir;
6. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota terlampir;
7. Yang bersangkutan;
8. Peringgal.

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NOMOR 230 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASAR TERTIB UKUR TAHUN 2024

PASAR TERTIB UKUR TAHUN 2024

I. WILAYAH BSML REGIONAL I

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
1	Sumatera Utara	1	Kab. Humbang Hasundutan	Pasar Parlilitan
				Pasar Tradisional Lingtongnihuta
2	Sumatera Barat	2	Kab. Sijunjung	Pasar Gambok
				Pasar Inpres Muaro
		3	Kab. Padang Pariaman	Pasar Batu Basa
				Pasar Padang Sago
		4	Kab. Agam	Pasar Lama Terminal Antokan
		5	Kota Padang	Pasar Lubuk Buaya
Pasar Nanggalo				
3	Jambi	6	Kab. Merangin	Pasar Bawah Bangko
				Pasar Kampung 6 Margo Tabir
				Pasar Pamenang
				Pasar Rantau Panjang
		7	Kab. Tebo	Pasar Sarinah
				Pasar Sungai Bengkal
				Pasar Tanjung Bungur
		8	Kota Jambi	Pasar Pasir Putih
				Pasar Talang Banjar
Pasar Villa Kenali				
4	Lampung	9	Kab. Tanggamus	Pasar Gisting Purwodadi
5	Kepulauan Bangka Belitung	10	Kab. Bangka	Pasar Kenanga
				Pasar Kite
				Pasar Perumnas Belinyu
		11	Kab. Bangka Tengah	Pasar Air Mesu
				Pasar Batu Belubang
				Pasar Benteng
				Pasar Kayu Besi
				Pasar Keretak
				Pasar Koba
				Pasar Lampur
				Pasar Lubuk Pabrik
				Pasar Namang
				Pasar Perlang
				Pasar Simpang Katis
Pasar Sungaiselan				
6	Kepulauan Riau	12	Kab. Bintan	Pasar Inpres Kijang
				Pasar Kawal
		13	Kota Batam	Pasar Angkasa Bengkong
				Pasar Aviari
				Pasar Bengkong Harapan
				Pasar Botania 2
				Pasar BTC

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
				Pasar Cipta Puri
				Pasar Mega Legenda
				Pasar Melcem
				Pasar Pasir Putih
				Pasar Pujabahari
				Pasar Summerland
				Pasar Tiban Centre
				Pasar Tiban Kampung
		14	Kota Tanjung Pinang	Pasar Inpres Potong Lembu

II. WILAYAH BSML REGIONAL II

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
1	DKI Jakarta	1	Kota Jakarta Barat	Pasar Cengkareng
				Pasar Duta Mas
				Pasar Ganefo
				Pasar Gang Kancil
				Pasar Glodok
				Pasar Jembatan Besi
				Pasar Jembatan Dua
				Pasar Kalideres
				Pasar Kedoya
				Pasar Lokbin Meruya
				Pasar Pagi
				Pasar Pecah Kulit
				Pasar Pejagalan
				Pasar Pos Pengumben
				Pasar Puri Indah
				Pasar Sawah Besar
				Pasar Slipi
				Pasar Timbul Barat
		2	Kota Jakarta Pusat	Pasar Baru Metro Atom
				Pasar Bendungan Hilir
				Pasar Cempaka Putih
				Pasar Cideng Thomas
				Pasar Cikini Ampium
				Pasar Gardu Asem
				Pasar Gembrong
				Pasar Gondangdia
				Pasar Karang Anyar
				Pasar Kombongan
				Pasar Kwitang Dalam
				Pasar Lokbin Gembrong
		3	Kota Jakarta Selatan	Pasar Senen Blok III
				Pasar Senen Blok IV
				Pasar Sumur Batu
				Pasar Bukit Duri Puteran
				Pasar Cidodol
				Pasar Cipete Selatan

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
				Pasar Kebayoran Lama
				Pasar Lenteng Agung
				Pasar Lokbin Bintaro
				Pasar Lokbin Pasar Minggu
				Pasar Mayestik
				Pasar Mede
				Pasar Menteng Pulo
				Pasar Pesanggrahan
				Pasar Pondok Indah
				Pasar Pondok Labu
				Pasar Rumput
				Pasar Tebet Barat
				Pasar Tebet Timur
		4	Kota Jakarta Timur	Pasar Cakung
				Pasar Cibubur
				Pasar Cipinang Muara
				Pasar Ciplak
				Pasar Ciracas
				Pasar Induk Beras Cipinang
				Pasar Jambul
				Pasar Jatinegara
				Pasar Kramat Jati
				Pasar Lokbin Makassar
				Pasar Lokbin Munjul
				Pasar Pal Meriam
				Pasar Pondok Bambu
				Pasar Pulo Jahe
				Pasar Rawamangun
				Pasar Ujung Menteng
		5	Kota Jakarta Utara	Pasar Fresh Market - PIK
				Pasar Kelapa Gading
				Pasar Kelapa Gading Mandiri
				Pasar Koja Baru
				Pasar Lontar
				Pasar Muara Karang
				Pasar Pademangan Barat
				Pasar Pademangan Timur
				Pasar Pedongkelan
				Pasar Pelita
				Pasar PIK
				Pasar Pusat Grosir Ikan Muara Angke
				Pasar Rawa Badak
				Pasar Sindang
				Pasar Sukapura
				Pasar Sunter Podomoro
				Pasar Teluk Gong
				Pasar Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke
				Pasar Walang Baru
				Pasar Waru

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
2	Jawa Barat	6	Kab. Bogor	Pasar Parung Panjang
		7	Kab. Majalengka	Pasar Ciborelang
		8	Kab. Bekasi	Pasar Kedunggede
				Pasar Setu
				Pasar Tambun
		9	Kab. Purwakarta	Pasar Rebo
		10	Kab. Karawang	Pasar Kondang
				Pasar Telagasari
				Pasar Wadas
		11	Kota Cirebon	Pasar Drajat
				Pasar Pagi
				Pasar Pronggol
		12	Kota Cimahi	Pasar Antri Baru
Pasar Cimindi				
Pasar Rancabentang				
13	Kota Tasikmalaya	Pasar Cikurubuk		
		Pasar Indihiang		
		Pasar Pancasila		
3	Jawa Tengah	14	Kab. Cilacap	Pasar Adipala
				Pasar Binangun
				Pasar Cipari
				Pasar Ciporos
				Pasar Gede Cilacap
				Pasar Jeruklegi
				Pasar Karangpucung
				Pasar Karna Sidareja
				Pasar Kawunganten
				Pasar Kemojing
				Pasar Kesugihan
				Pasar Kroya
				Pasar Kuripan
				Pasar Majenang
				Pasar Nusawungu
				Pasar Palembang
				Pasar Panimbang
				Pasar Saliwangi
				Pasar Sampang
		Pasar Senin		
		Pasar Sidodadi		
		Pasar Tanjung Sari		
		Pasar Ujungmanik		
		Pasar Wanareja		
15	Kab. Banyumas	Pasar Ajibarang		
		Pasar Banyumas		
		Pasar Buntu		
		Pasar Cilongok		
		Pasar Jatilawang		
		Pasar Legok		
		Pasar Manis		
Pasar Pon				

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
				Pasar Proliman
				Pasar Sangkalputung
				Pasar Sokaraja
				Pasar Tambak
				Pasar Wangon
		16	Kab. Purbalingga	Pasar Bandingan
		17	Kab. Kebumen	Pasar Puring
				Pasar Sruni
				Pasar Wonokriyo
		18	Kab. Purworejo	Pasar Baledono
				Pasar Butuh
				Pasar Gebang
				Pasar Grabag
				Pasar Jenarwetan
				Pasar Kaliboto
				Pasar Kemiri
				Pasar Kutoarjo
				Pasar Lugosobo
				Pasar Maron
				Pasar Mundusari
				Pasar Ngori
				Pasar Pagi Liwung
				Pasar Seren
				Pasar Soko
				Pasar Winong
				Pasar Wirotaman
		19	Kab. Magelang	Pasar Borobudur
				Pasar Desa Sidowangi Kajoran
				Pasar Muntilan
				Pasar Talun
				Pasar Tempuran
		20	Kab. Sukoharjo	Pasar Godog
				Pasar Grogol
				Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo
				Pasar Jamu Nguter
				Pasar Kartasura
				Pasar Sragen
				Pasar Tanjungrejo
				Pasar Tawang Sari
				Pasar Telukan
		21	Kab. Wonogiri	Pasar Watukelir
				Pasar Eromoko
				Pasar Jati Srono
		22	Kab. Sragen	Pasar Sidoharjo
				Pasar Blimbing
				Pasar Jati Tengah
				Pasar Ngrampal
				Pasar Sonorejo
				Pasar Sumberlawang
				Pasar Suwatu

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
		23	Kab. Grobogan	Pasar Agro Hortikultura Purwodadi
				Pasar Umum Grobogan
				Pasar Umum Gubug
				Pasar Umum Nglejok
		24	Kab. Blora	Pasar Mulyorejo
				Pasar Wulung
		25	Kab. Rembang	Pasar Desa Sumbergirang
				Pasar Jolotundo
				Pasar Pandangan
		26	Kab. Kudus	Pasar Brayung
				Pasar Doro
				Pasar Jekulo
				Pasar Jember
				Pasar Karangbener
				Pasar Kliwon
				Pasar Mijen
		27	Kab. Jepara	Pasar Jepara I
				Pasar Kalinyamatan
				Pasar Keling
		28	Kab. Demak	Pasar Bakung
				Pasar Bintoro
				Pasar Brambang
				Pasar Buyaran
				Pasar Gablok
				Pasar Gading
				Pasar Gajah
				Pasar Jebor
				Pasar Karanganyar
				Pasar Sayung
				Pasar Sriwulan
				Pasar Wedung
				Pasar Wonopolo
				Pasar Wonosalam
		29	Kab. Semarang	Pasar Babadan
				Pasar Bandarjo
				Pasar Getasan
				Pasar Kaliwungu
				Pasar Kebondowo
				Pasar Kembang Sari
				Pasar Suruh
		30	Kab. Temanggung	Pasar Kedu
				Pasar Kliwon Temanggung
				Pasar Ngimbrang
				Pasar Pingit
				Pasar Tepusen
		31	Kab. Kendal	Pasar Desa Galih
				Pasar Pagi Kaliwungu
		32	Kab. Batang	Pasar Desa Blado
				Pasar Gorong
				Pasar Tersono

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
		33	Kab. Pekalongan	Pasar Desa Pakis Putih
				Pasar Pekajangan
		34	Kab. Pemalang	Pasar Sruwet Bumirejo
				Pasar Tambeng Desa Kandang
		35	Kab. Tegal	Pasar Balamoa
				Pasar Jatilaba
				Pasar Pepedan
				Pasar Suradadi
		36	Kota Magelang	Pasar Gotong Royong
				Pasar Kebonpolo
				Pasar Rejowinangun
		37	Kota Semarang	Pasar Bom Lama
				Pasar Dargo
				Pasar Gayamsari
				Pasar Jatingaleh
				Pasar Kanjengan
				Pasar Karimata
				Pasar Kedung Mundu
				Pasar Langgar Indah
				Pasar Mangkang
				Pasar Meteseh
				Pasar Mijen
				Pasar Pedurungan
				Pasar Purwogondo
				Pasar Purwoyoso
				Pasar Selomas
				Pasar Sisingamangaraja
				Pasar Suryo Kusumo
		38	Kota Tegal	Pasar Karangdawa
				Pasar Kejambon
				Pasar Krandon
				Pasar Langon
				Pasar Martoloyo
				Pasar Randugunting
				Pasar Sumurpanggang
4	DI Yogyakarta	39	Kab. Kulon Progo	Pasar Dekso
				Pasar Kentheng Nanggulan
				Pasar Menguri
				Pasar Nganggrung
				Pasar Semawung Kaliagung
		40	Kab. Bantul	Pasar Celep
				Pasar Imogiri
				Pasar Pleret
				Pasar Sorobayan
		41	Kab. Gunung Kidul	Pasar Baran
				Pasar Bedoyo
				Pasar Bintaos
				Pasar Nglipar
				Pasar Semin
				Pasar Trowono

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
		42	Kab. Sleman	Pasar Cebongan
				Pasar Condongcatur
				Pasar Denggung
				Pasar Jangkang
				Pasar Kalasan
				Pasar Kenaran
				Pasar Ngijon
				Pasar Ngino
				Pasar Pakem
				Pasar Pendulan
				Pasar Potrojayan
				Pasar Prambanan
				Pasar Sleman Unit I
				Pasar Sleman Unit II
				Pasar Wonosari
		43	Kota Yogyakarta	Pasar Beringharjo Timur
				Pasar Condronegaran
				Pasar Demangan
				Pasar Gading
				Pasar Kotagede
				Pasar Legi
				Pasar Pingit
				Pasar Sentul
				Pasar Serangan
				Pasar Talok
5	Jawa Timur	44	Kab. Trenggalek	Pasar Bendo
				Pasar Depok
				Pasar Durenan
				Pasar Gandusari
				Pasar Kampak
				Pasar Pule
				Pasar Sumberingin
		45	Kab. Tulungagung	Pasar Mulyosari
				Pasar Ngantru
				Pasar Ngrance
				Pasar Rejotangan
		46	Kab. Blitar	Pasar Garum
				Pasar Talun
		47	Kab. Kediri	Pasar Kandangan
				Pasar Ngadiluwih
				Pasar Pare Lama
		48	Kab. Malang	Pasar Tumpang
		49	Kab. Lumajang	Pasar Kedawung
				Pasar Labruk Kidul
				Pasar Nogosari
				Pasar Randuagung
				Pasar Sidorejo
		50	Kab. Situbondo	Pasar Ardirejo
				Pasar Mangaran
				Pasar Mimbaan

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
		51	Kab. Probolinggo	Pasar Bantaran
				Pasar Besuk
				Pasar Dringu
				Pasar Kota Anyar
				Pasar Leces Baru
				Pasar Lumbang
				Pasar Patalan
				Pasar Sukapura
				Pasar Sumber Bulu
				Pasar Wangkal
		52	Kab. Pasuruan	Pasar Rakyat Gempol
		53	Kab. Nganjuk	Pasar Gondang
				Pasar Ngronggot
				Pasar Pace
				Pasar Sawahan
				Pasar Warujayeng
		54	Kab. Madiun	Pasar Gantrung
				Pasar Kaibon
				Pasar Sayur Caruban
				Pasar Sidomulyo
		55	Kab. Magetan	Pasar Parang
		56	Kab. Ngawi	Pasar Gentong
				Pasar Kedung Prahu
				Pasar Sembung
				Pasar Walikukun
		57	Kab. Bojonegoro	Pasar Buk Duwur
				Pasar Desa Blimbinggede
				Pasar Desa Gondang
				Pasar Desa Temayang
				Pasar Ngambon
				Pasar Ngasem
		58	Kab. Tuban	Pasar Desa Bangilan
				Pasar Desa Prambon Tergayang
				Pasar Jatirogo
				Pasar Plumpang
				Pasar Soko Sari
				Pasar Umum Desa Margomulyo
		59	Kab. Gresik	Pasar Desa Balongpanggang
				Pasar Desa Bulurejo
				Pasar Sidomoro-Gresik
				Pasar Ujungpangkah
		60	Kab. Sumenep	Pasar Guluk-Guluk
				Pasar Lenteng
				Pasar Talango
		61	Kota Kediri	Pasar Banjaran
				Pasar Bawang
		62	Kota Malang	Pasar Bareng
				Pasar Baru Barat
				Pasar Bunul Rejo
				Pasar Gadang Lama

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
				Pasar Kasin
				Pasar Kebalen
				Pasar Klojen
				Pasar Lesan Puro
				Pasar Mergan
				Pasar Oro Oro Dowo
				Pasar Sukun
				Pasar Terpadu Dinoyo
				Pasar Tradisional Madyopuro
		63	Kota Probolinggo	Pasar Gotong Royong
		64	Kota Madiun	Pasar Ketapang
				Pasar Sleko
		65	Kota Surabaya	Pasar Srijaya Sayur
				Pasar Krukah
6	Banten	66	Kab. Lebak	Pasar Maja
				Pasar Rangkasbitung
		67	Kab. Tangerang	Pasar Adiyasa
				Pasar Benda
				Pasar Bojong Nangka
				Pasar Cayur
				Pasar Cisoka
				Pasar Ciung
				Pasar Daon
				Pasar Desa Cikupa
				Pasar Gembong
				Pasar Gudang Tigaraksa
				Pasar Kampung Melayu
				Pasar Kemiri
				Pasar Kemis
				Pasar Sepatan
				Pasar TPI Cituis
		68	Kota Tangerang	Pasar Ampera
				Pasar Babakan
				Pasar Bandeng
				Pasar Batako
				Pasar Bengkok
				Pasar Gerendeng
				Pasar Induk Jatiuwung
				Pasar Keroncong Permai
				Pasar Laris Cibodas
				Pasar Malabar
				Pasar Nyamuk
				Pasar Ramadhani
7	Bali	69	Kab. Gianyar	Pasar Rubuh
				Pasar Bulan
				Pasar Desa Pejeng
				Pasar Rakyat Gianyar
				Pasar Sukawati
				Pasar Umum Payangan
				Pasar Umum Tegallalang

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
				Pasar Yadnya
		70	Kab. Klungkung	Pasar Rakyat Tusan
		71	Kab. Bangli	Pasar Lumbuan
		72	Kab. Buleleng	Pasar Anyar I Singaraja
				Pasar Banjar
				Pasar Banyuasri
				Pasar Kampung Bugis
				Pasar Les
				Pasar Pancasari
				Pasar Pamaron
				Pasar Penuktukan
				Pasar Sangsit
				Pasar Sawan
				Pasar Sembiran
				Pasar Seririt
				Pasar Sudaji
				Pasar Tamblang
		73	Kota Denpasar	Pasar Abiantimbul
				Pasar Anyar Sari
				Pasar Badung
				Pasar Desa Pekraman Penatih
				Pasar Gunung Agung Utara
				Pasar Pedungan
8	Nusa Tenggara Barat	74	Kab. Lombok Timur	Pasar Umum Kotaraja
				Pasar Umum Sakra
		75	Kota Mataram	Pasar ACC

III. WILAYAH BSML REGIONAL III

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
1	Kalimantan Barat	1	Kab. Sambas	Pasar Pemangkat
				Pasar Sempalai
				Pasar Sambas
				Pasar Sekura
				Pasar Semparuk
		2	Kab. Bengkayang	Pasar Sungai Duri
		3	Kab. Kapuas Hulu	Pasar Lanjak
		4	Kota Pontianak	Pasar Flamboyan
				Pasar Kemuning
				Pasar Dahlia
				Pasar Teratai
				Pasar Tengah
2	Kalimantan Tengah	5	Kab. Kotawaringin Timur	Pasar Mawar
				Pasar Nipah Kuning
				Pasar Swadaya Sungai Raya Dalam
				Pasar Keramat
				Pasar Mangkikit Sampit
				Pasar Sejumpt Baamang

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
		6	Kab. Barito Selatan	Pasar Sejumpt Ketapang
				Pasar Desa Baru
				Pasar Mengkatip
				Pasar Subuh Buntok
		7	Kab. Barito Utara	Pasar Benangin
				Pasar Ipu
				Pasar Kandui
				Pasar Lampeong
				Pasar Bukit Sawit
				Pasar Dermaga
				Pasar Lahei I
				Pasar Trahean
				Pasar Tumpung Laung
		8	Kab. Katingan	Pasar Desa Hampalit
				Pasar Tumbang Samba
				Pasar Pegatan
3	Kalimantan Selatan	9	Kab. Tanah Laut	Pasar Asam-Asam
				Pasar Gunung Makmur
				Pasar Handil Babiririk
				Pasar Jorong
				Pasar Kurau
				Pasar Tanjung
				Pasar Tapandang Berseri
		10	Kab. Kotabaru	Pasar Lontar
		11	Kab. Banjar	Pasar Batu Tanam
				Pasar Karangan Putih
				Pasar Niaga
				Pasar Pengaron
				Pasar Pusat Perbelanjaan Sekumpul
		12	Kab. Tabalong	Pasar Arba
				Pasar Rakyat Mabu'un Syariah
		13	Kota Banjarmasin	Pasar Gedang
				Pasar Pandu
				Pasar Simpang Telawang
				Pasar Teluk Dalam Muara
				Pasar Cemara
				Pasar Kong
				Pasar Kuripan
4	Kalimantan Timur	14	Kota Balikpapan	Pasar Pandansari
		15	Kota Bontang	Pasar Taman Rawa Indah

IV. WILAYAH BSML REGIONAL IV

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
1	Sulawesi Tengah	1	Kab. Banggai	Pasar Unjulan
		2	Kab. Toli Toli	Pasar Susumbolan
2	Sulawesi Selatan	3	Kab. Bulukumba	Pasar Bontomanai
		4	Kab. Maros	Pasar Ammarang
				Pasar Bontokappong

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
				Pasar Bulu-Bulu
				Pasar Butta Salewangang
				Pasar Diccekang
				Pasar Masale
		5	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Pasar Erasa
				Pasar Segeri
				Pasar Sentral Palampang
		6	Kab. Barru	Pasar Doi-Doi
				Pasar Ele
				Pasar Mattirowalie
				Pasar Takkalasi
		7	Kab. Wajo	Pasar Buriko
				Pasar Peneki
				Pasar Salobulo
				Pasar Siyo
3	Sulawesi Tenggara	8	Kab. Enrekang	Pasar Belajen
		9	Kab. Luwu Utara	Pasar Sukamaju
		10	Kab. Luwu Timur	Pasar Kawarasan
				Pasar Lakawali
				Pasar Madani
				Pasar Sumber Makmur
		11	Kab. Toraja Utara	Pasar Pagi
		12	Kota Parepare	Pasar Sumpang Minangae
				Pasar Labukkang
				Pasar Senggol
		13	Kab. Kolaka	Pasar Anaiwoi
				Pasar Dawi-Dawi
				Pasar Konoweha
				Pasar Kukutio
				Pasar Lamekongga
				Pasar Malaha
				Pasar Malombo
				Pasar Polinggona
				Pasar Puubunga
				Pasar Raya Mekongga
				Pasar Tamborasi
				Pasar Tandebura
				Pasar Watubangga
				Pasar Wolo
				Pasar Wolulu
				Pasar Wonua Raya
		14	Kab. Buton Tengah	Pasar Lombe
4	Gorontalo	15	Kab. Boalemo	Pasar KTM
5	Sulawesi Barat	16	Kab. Polewali Mandar	Pasar Campalagian
				Pasar Pekkabata
6	Maluku	17	Kab. Kepulauan Aru	Pasar Apung
				Pasar Besi Tua
		18	Kab. Buru Selatan	Pasar Kai-Wait
		19	Kota Ambon	Pasar Wayame

No	Provinsi	No	Kab/Kota	Nama Pasar
7	Maluku Utara	20	Kota Ternate	Pasar Bastiong
				Pasar Gamalama
				Pasar Kota Baru

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Niagam Penghargaan

Diberikan kepada:

Pasar Flamboyan, Kota Pontianak

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

Pasar Kemuning, Kota Pontianak

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Hiagam Penghargaan

Diberikan kepada:

Pasar Dahlia, Kota Pontianak

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

Pasar Teratai, Kota Pontianak

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Niagam Penghargaan

Diberikan kepada:

Pasar Tengah, Kota Pontianak

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

Pasar Mawar, Kota Pontianak

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

Pasar Nipah Kuning, Kota Pontianak

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

Pasar Swadaya Sungai Raya Dalam, Kota Pontianak

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024

Jakarta, 12 Juni 2025

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang

Tabel
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri				1. Laju PDRB sektor Perdagangan	4,97%	4,98%	15.859.845.690	4,99%	16.598.068.360	5,00%	17.187.155.290	5,00%	49.628.569.340	DKUMP	Kota Pontianak
				2. Laju PDRB sektor Industri	4,74%	4,75%		4,77%		4,80%		4,80%			
	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan			Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan	60,00%	75,00%	746.673.600	80,00%	1.143.873.600	85,00%	1.207.273.600	85,00%	3.097.820.800	DKUMP	Kota Pontianak
		03:30:03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	50,00%	100,00%	746.673.600	100,00%	1.143.873.600	100,00%	1.207.273.600	100,00%	3.097.820.800	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	14 Unit	14 Unit	674.973.600	15 Unit	1.038.973.600	18 Unit	1.059.973.600	18 Unit	2.773.920.800	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	2 Unit	640.473.600	3 Unit	988.973.600	3 Unit	989.473.600	3 Unit	2.618.920.800	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14 Unit	14 Unit	34.500.000	15 Unit	50.000.000	18 Unit	70.500.000	18 Unit	155.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	14 Unit	14 Unit	71.700.000	15 Unit	104.900.000	18 Unit	147.300.000	18 Unit	323.900.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.850.000	1 Dokumen	52.450.000	1 Dokumen	73.650.000	1 Dokumen	161.950.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.850.000	1 Dokumen	52.450.000	1 Dokumen	73.650.000	1 Dokumen	161.950.000	DKUMP	Kota Pontianak
	Meningkatnya pelaku industri kecil			Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil	2.36%	2.50%	1.084.000.000	2.60%	1.120.000.000	2.80%	1.270.000.000	2,80%	3.457.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
		03:31:02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100%	100%	1.076.500.000	100%	1.085.000.000	100%	1.200.000.000	100%	3.361.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.076.500.000	1 Dokumen	1.085.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	3.361.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	3.000.000.000	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 1 Dokumen	7 1 Dokumen	8 35.000.000	9 1 Dokumen	10 40.000.000	11 1 Dokumen	12 85.000.000	13 1 Dokumen	14 160.000.000	15 DKUMP	16 Kota Pontianak
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	9.500.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	84.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	107.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.31.02.2.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		03:31:03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh	78%	80%	1.500.000	80%	5.000.000	85%	20.000.000	85%	10.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	10.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	16.500.000	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		03:31:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri	90%	90%	6.000.000	90%	30.000.000	90%	50.000.000	90%	86.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri terdata dalam SIINAS	42%	50%	6.000.000	55%	30.000.000	60%	50.000.000	60%	86.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	46.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	25.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
	Meningkatnya Koperasi yang Aktif			persentase koperasi aktif	95%	97%	438.670.000	97.50%	479.670.000	98%	523.170.000	98%	1.441.510.000	DKUMP	Kota Pontianak
		02:17:02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.02.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	-	1 Unit Usaha	-	1 Unit Usaha	15.000.000	1 Unit Usaha	15.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah izin yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.02.2.02.0001	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	-	1 Unit Usaha	-	1 Unit Usaha	-	1 Unit Usaha	-	DKUMP	Kota Pontianak
		02:17:03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan	29%	35%	21.500.000	40%	33.500.000	45%	45.500.000	45%	100.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	485 Unit Usaha	485 Unit Usaha	21.500.000	485 Unit Usaha	33.500.000	485 Unit Usaha	45.500.000	485 Unit Usaha	100.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	512 Unit Usaha	512 Unit Usaha	21.500.000	512 Unit Usaha	33.500.000	512 Unit Usaha	45.500.000	512 Unit Usaha	100.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
		02:17:04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	4,00%	5,00%	3.000.000	6,00%	30.500.000	6,00%	42.500.000	6,00%	76.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang benilai SEHAT	7 Unit Usaha	8 Unit Usaha	3.000.000	10 Unit Usaha	30.500.000	10 Unit Usaha	42.500.000	10 Unit Usaha	76.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha	125 Unit Usaha	3.000.000	130 Unit Usaha	5.500.000	150 Unit Usaha	7.500.000	150 Unit Usaha	16.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	20 Unit Usaha	-	25 Unit Usaha	25.000.000	30 Unit Usaha	35.000.000	30 Unit Usaha	60.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		02:17:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	32%	35%	410.170.000	40%	410.170.000	40%	410.170.000	40%	1.230.510.000	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Koperasi yang dilatih	160 Orang	180 Orang	410.170.000	180 Orang	410.170.000	180 Orang	410.170.000	180 Orang	1.230.510.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	160 Orang	180 Orang	410.170.000	180 Orang	410.170.000	180 Orang	410.170.000	180 Orang	1.230.510.000	DKUMP	Kota Pontianak
		02:17:06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	94%	95%	4.000.000	95%	5.500.000	96%	10.000.000	96%	19.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.000.000	1 Kegiatan	5.500.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	19.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 Unit Usaha	120 Unit Usaha	4.000.000	120 Unit Usaha	5.500.000	150 Unit Usaha	10.000.000	150 Unit Usaha	19.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro			Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.3%	5%	13.590.502.090	5.50%	13.854.524.760	6%	14.186.711.690	6%	41.631.738.540	DKUMP	Kota Pontianak
		02:17:07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	2.65%	2.85%	13.000.000	2.95%	24.000.000	3%	50.000.000	3%	87.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	32 Unit Usaha	50 Unit Usaha	13.000.000	50 Unit Usaha	24.000.000	50 Unit Usaha	50.000.000	50 Unit Usaha	87.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	80 Unit Usaha	100 Unit Usaha	-	100 Unit Usaha	-	120 Unit Usaha	-	120 Unit Usaha	-	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1000 Unit Usaha	1100 Unit Usaha	-	1200 Unit Usaha	-	1300 Unit Usaha	-	1300 Unit Usaha	-	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	80 Unit Usaha	100 Unit Usaha	13.000.000	100 Unit Usaha	24.000.000	120 Unit Usaha	50.000.000	120 Unit Usaha	87.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	80 Orang	100 Orang	-	100 Orang	-	120 Orang	-	120 Orang	-	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	80 Orang	100 Orang		100 Orang	-	120 Orang	-	120 Orang		DKUMP	
	02:17:08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya		0,26%	0.34%	1.147.800.000	0.37%	1.315.800.000	0.42%	1.419.800.000	0.42%	3.883.400.000	DKUMP	Kota Pontianak
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.147.800.000	1 Kegiatan	1.315.800.000	1 Kegiatan	1.419.800.000	1 Kegiatan	3.883.400.000	DKUMP	Kota Pontianak
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		80 Unit Usaha	100 Unit Usaha	1.147.800.000	100 Unit Usaha	1.315.800.000	120 Unit Usaha	1.419.800.000	120 Unit Usaha	3.883.400.000	DKUMP	Kota Pontianak
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95%	95%	12.429.702.090	95%	12.514.724.760	95%	12.716.911.690	95%	37.661.338.540	DKUMP	Kota Pontianak
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	6.500.000	100%	7.500.000	100%	12.000.000	100%	26.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	5 Dokumen	5.500.000	5 Dokumen	6.000.000	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	21.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	DKUMP	Kota Pontianak
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	3 Laporan	1.000.000	3 Laporan	1.500.000	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	4.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	9.000.829.000	100%	8.852.261.000	100%	8.764.947.930	100%	26.618.037.930	DKUMP	Kota Pontianak
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		60 Orang / Bulan	65 Orang/Bulan	8.667.859.000	65 Orang/Bulan	8.519.291.000	65 Orang/Bulan	8.421.723.000	65 Orang/Bulan	25.608.873.000	DKUMP	Kota Pontianak
	X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	332.970.000	2 Dokumen	332.970.000	2 Dokumen	343.224.930	2 Dokumen	1.009.164.930	DKUMP	Kota Pontianak
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	X.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	70.610.000	100%	70.610.000	100%	80.610.000	100%	221.830.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 paket	70.610.000	2 paket	70.610.000	2 paket	70.610.000	2 paket	211.830.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5 Orang	-	5 Orang	-	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	-	5 Orang	-	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	298.500.000	100%	321.500.000	100%	376.500.000	100%	996.500.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	12.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	37.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	66.000.000	4 Paket	68.000.000	4 Paket	70.000.000	4 Paket	204.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.000.000	2 Paket	13.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	40.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	38.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	108.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	90.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.500.000	12 Dokumen	17.500.000	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	150.000.000	5 Laporan	155.000.000	5 Laporan	185.000.000	5 Laporan	490.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Dokumen	- Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	255.000.000	100%	315.000.000	100%	350.000.000	100%	920.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	-	-	-	-	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	-	-	-	-	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-	-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	155.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	330.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100.000.000	10 Unit	165.000.000	10 Unit	25.000.000	10 Unit	290.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.533.263.090	100%	2.652.853.760	100%	2.817.853.760	100%	8.003.970.610	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	325.000.000	12 Laporan	390.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	1.165.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.208.263.090	12 Laporan	2.262.853.760	12 Laporan	2.362.853.760	12 Laporan	6.833.970.610	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	265.000.000	100%	295.000.000	100%	315.000.000	100%	875.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	5 Unit	5 Unit	65.000.000	5 Unit	70.000.000	5 Unit	75.000.000	5 Unit	210.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	50.000.000	40 Unit	55.000.000	40 Unit	65.000.000	40 Unit	170.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	150.000.000	4 Unit	170.000.000	4 Unit	175.000.000	4 Unit	495.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
				3. Tingkat Inflasi	6,35%	3±1	767.483.310	3±1	880.692.640	3±1	1.194.037.710	3±1	2.817.213.660	DKUMP	Kota Pontianak
	Terkendalinya ketersediaan stok sembako dan barang penting lainnya			Persentase tingkat kecukupan stok sembako dan barang penting lainnya	100%	100%	767.483.310	100%	880.692.640	100%	1.194.037.710	100%	2.817.213.660	DKUMP	Kota Pontianak
		03:30:02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%	16.000.000	100%	38.654.930	100%	83.000.000	100%	137.654.930	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang Yang dimonitoring	8 Unit	75 Unit	-	78 Unit	-	80 Unit	-	80 Unit	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3.30.02.2.03.0002	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.04.0002	Facilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Fasilitas Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.000.000	1 Kegiatan	33.654.930	1 Kegiatan	58.000.000	1 Kegiatan	107.654.930	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.05.0001	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	33.654.930	1 Dokumen	58.000.000	1 Dokumen	107.654.930	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.06.0002	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
		03:30:04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	2%	2%	349.445.600	3%	405.000.000	3%	459.000.000	3%	1.213.445.600	DKUMP	Kota Pontianak
				2. Persentase kinerja realisasi pupuk	50%	60%		60%		70%		70%		DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	79.000.000	12 Laporan	131.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	40.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	40.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	29.000.000	2 Laporan	51.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	12 Laporan	12 Laporan	342.445.600	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	380.000.000	12 Laporan	1.082.445.600	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	42.445.600	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	167.445.600	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	900.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	DKUMP	Kota Pontianak
		03:30:05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	50%	60%	-	60%	-	70%	130.000.000	70%	130.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	130.000.000	1 Kegiatan	130.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	-	5 Pelaku Usaha	-	5 Pelaku Usaha	-	5 Pelaku Usaha	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	-	5 Pelaku Usaha	-	5 Pelaku Usaha	-	5 Pelaku Usaha	-	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	-	5 Pelaku Usaha	-	5 Pelaku Usaha	100.000.000	5 Pelaku Usaha	100.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2 Produk	2 Produk	-	2 Produk	-	2 Produk	30.000.000	2 Produk	30.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		03:30:06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera resmi yang berlaku	100%	100%	102.037.710	100%	137.037.710	100%	147.037.710	100%	386.113.130	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	17802 Unit	17900 Unit	102.037.710	18000 Unit	137.037.710	18000 Unit	147.037.710	18000 Unit	386.113.130	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	17802 Unit	17900 Unit	102.037.710	18000 Unit	137.037.710	18000 Unit	147.037.710	18000 Unit	386.113.130	DKUMP	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	6 50 Orang	7 70 Orang	8	9 80 Orang	10	11 100 Orang	12	13 100 Orang	14	15 DKUMP	16 Kota Pontianak
		3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	DKUMP	Kota Pontianak
		03:30:07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,27%	0,27%	300.000.000	0,40%	300.000.000	0,53%	375.000.000	0,53%	950.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	300.000.000	75 Unit Usaha	300.000.000	100 Unit Usaha	375.000.000	100 Unit Usaha	950.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	15 Orang	25 Orang	-	30 Orang	-	35 Orang	25.000.000	35 Orang	25.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	25 UMKM	-	30 UMKM	-	35 UMKM	50.000.000	35 UMKM	50.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	50 UMKM	300.000.000	75 UMKM	300.000.000	100 UMKM	300.000.000	100 UMKM	900.000.000	DKUMP	Kota Pontianak
							Pagu 2024		Pagu 2025		Pagu 2026		Akhir		
							16.627.329.000		17.478.761.000		18.381.193.000		52.445.783.000		



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jalan Aliyong No. 7C Pontianak, Kalimantan Barat 78116

Telp. / Fax: (0561) 730416

Laman: <https://diskumdag.pontianak.go.id> Pos-el: dkump@pontianak.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBRAHIM, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDI SURYANTO, Ak., MM
Jabatan : Pj. Wali Kota Pontianak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

EDI SURYANTO, Ak., MM

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK,**

**IBRAHIM, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196902111990031005**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	1. Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan	80%
2	Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya	2. Persentase Tingkat Kecukupan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya	100%
3	Meningkatnya Pelaku Industri Kecil	3. Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil	2,60%
4	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	4. Persentase Koperasi Aktif	97,50%
5	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	5. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	5,50%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 342.209.435	APBD
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 33.407.880	APBD
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 67.000.000	APBD
	Rp. 1.200.000.000	APBN
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 282.295.800	APBD
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 570.000.000	APBD
	Rp. 300.000.000	APBN
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.591.000.000	APBD
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Rp. 40.000.000	APBD
8. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 21.500.000	APBD
9. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 3.000.000	APBD
10. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 134.308.000	APBD
	Rp. 743.750.000	APBN
11. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 5.500.000	APBD
12. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 13.000.000	APBD
13. Program Pengembangan UMKM	Rp. 1.672.088.000	APBD
	Rp. 264.790.565	APBN

Pontianak, 31 Januari 2025


WALI KOTA PONTIANAK,
EDI SURYANTO, Ak., MM


KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK,
IBRAHIM, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196902111990031005



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jalan Aliyang No. 7C Pontianak, Kalimantan Barat 78116

Telp. / Fax: (0561) 730416

Laman: <https://diskumdag.pontianak.go.id> Pos-el: dkump@pontianak.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBRAHIM, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T

Jabatan : Wali Kota Pontianak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Oktober 2025

Pihak Kedua,

WALI KOTA PONTIANAK,



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK,**



IBRAHIM, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196902111990031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri	Laju PDRB sektor Perdagangan Laju PDRB sektor Industri Tingkat Inflasi	4,99% 4,77% 3±1%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan	80%
3	Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya	Persentase Tingkat Kecukupan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya	100%
4	Meningkatnya Pelaku Industri Kecil	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil	2,60%
5	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	Persentase Koperasi Aktif	97,50%
6	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	5,50%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 289.041.048	APBD
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 54.734.304	APBD
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 98.386.000	APBD
	Rp. 1.216.474.979	APBN
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 239.749.800	APBD
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 354.249.700	APBD
	Rp. 294.329.000	APBN
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 2.941.161.033	APBD
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Rp. 37.627.000	APBD
8. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 11.440.000	APBD
9. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 2.435.680	APBD

10. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 123.216.800	APBD
	Rp. 743.750.000	APBN
11. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 76.900.180	APBD
12. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 6.650.000	APBD
13. Program Pengembangan UMKM	Rp. 1.672.088.000	APBN
	Rp. 246.514.650	APBD

Pontianak, Oktober 2025



WALI KOTA PONTIANAK,

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T



**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK,**

**IBRAHIM, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196902111990031005**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

Jalan Alianyang No. 7 C Pontianak
Telp/Fax : (0561) 730416 email : dkump@pontianak.go.id

